

PENGARUH KEADILAN PAJAK TERHADAP MOTIVASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK

**(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN
KONSULTASI PERPAJAKAN PACITAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**NIRMA TRIANTI
NIM. 145030401111043**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG**

2018

MOTTO

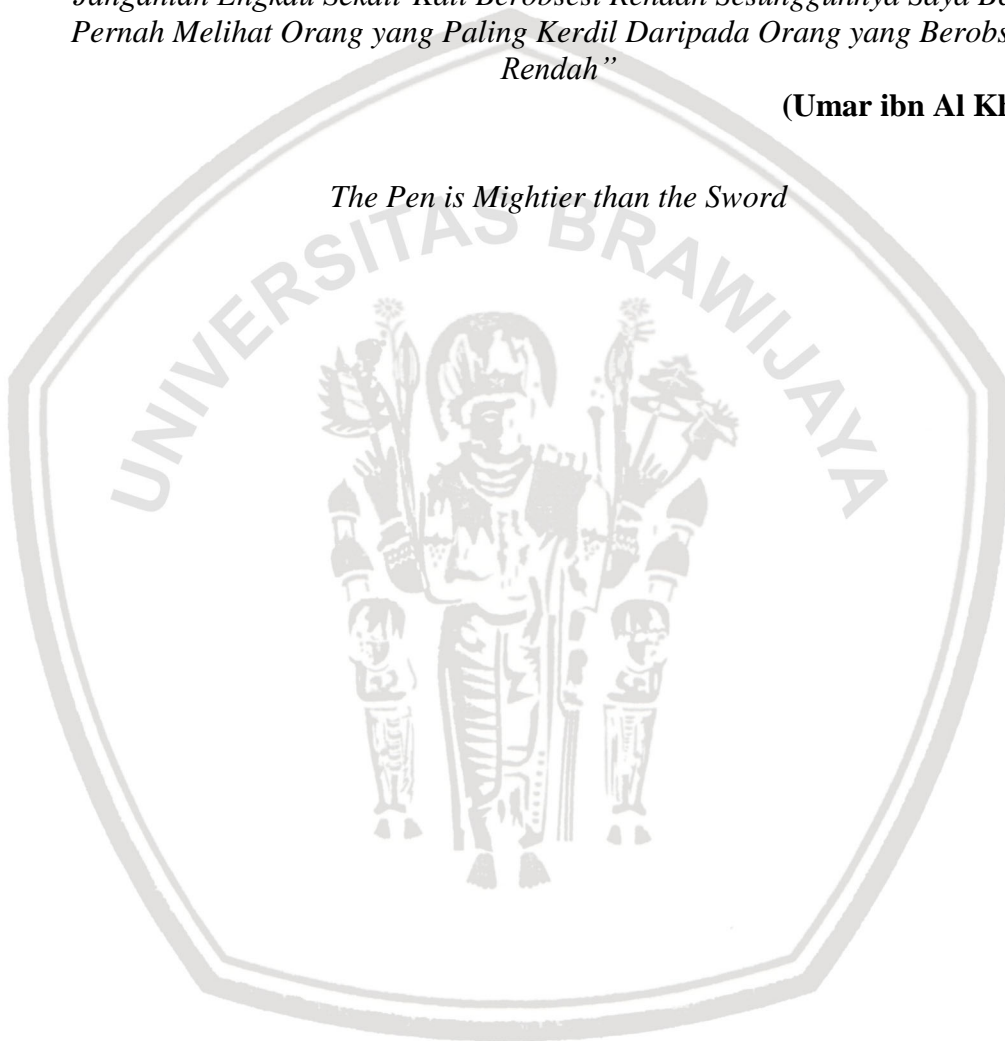
*“Barangsiapa Menempuh Jalan yang Padanya Dia Menuntut Ilmu, Maka Allah
Telah Menuntunnya Jalan Ke Surga”*

(HR. Muslim)

*“Janganlah Engkau Sekali-Kali Berobsesi Rendah Sesungguhnya Saya Belum
Pernah Melihat Orang yang Paling Kerdil Daripada Orang yang Berobsesi
Rendah”*

(Umar ibn Al Khattab)

The Pen is Mightier than the Sword



PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No. 20 tahun 2003. Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70.

Malang, 29 Oktober 2018



Nama : Nirma Trianti
NIM : 145030401111043

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak
Disusun oleh : Nirma Trianti
NIM : 145030401111043
Fakultas : Ilmu Administrasi
Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis
Program Studi : Perpajakan

Malang, 6 September 2018

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Drs. Heru Susilo, MA
NIP. 19591210 198601 1 001



Latifah Hanum, SE, MSA, Ak.CA
NIP. 20140584 0617 2 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan didepan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin
 Tanggal : 3 Desember 2018
 Jam : 08.00
 Skripsi Atas Nama : Nirma Trianti
 Judul : Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pacitan)

Dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota




Drs. Heru Susilo, MA
 NIP.195912101986011001

Latifah Hanum, SE, MSA, Ak
 NIP.2014058406172001

Anggota

Anggota




Rosalita Rachma Agusti, SE, MSA, Ak
 NIP. 198708312014042001

Kartika Putri Kumalasari, SE, MSA, Ak
 NIP.19871232015042002

RINGKASAN

Nirma Trianti, 2018, **Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak** (Studi Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pacitan), Drs. Heru Susilo, MA, Latifah Hanum, SE, MSA, Ak. CA, 132 hal + xiii

Penelitian ini dilakukan atas dasar banyaknya permasalahan terkait keadilan pajak ditengah masyarakat. Permasalahan tidak meratanya distribusi pembebanan pajak yang menyebabkan pemungutan pajakpun tidak maksimal terhadap Wajib Pajak. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selama ini dinilai kurang efektif atau malah cenderung salah sasaran seperti halnya kebijakan amnesti pajak yang tujuannya adalah untuk menarik dana-dana yang di parkir diluar negeri oleh orang-orang kapitalis namun kenyataannya paling besar porsi disumbang dari dana dalam negeri. Masalah lainnya adalah terkait dengan besaran tarif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tahun 2017 salah seorang penulis terkenal di Indonesia menyatakan bahwa tidak akan menulis novel lagi dikarenakan pengenaan pajak atas penulis yang terlalu besar dan hal ini juga dibenarkan oleh rekan-rekannya sesama penulis. Semua hal ini akhirnya memengaruhi motivasi seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini ingin mencari adakah pengaruh keadilan umum, kepentingan pribadi, struktur tarif pajak, ketentuan-ketentuan yang diberlakukan khusus dan timbal balik dengan pemerintah terhadap motivasi seseorang dalam membayar pajak pada KP2KP Kabupaten Pacitan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian yang dipakai adalah *explanatory research*. Jumlah populasinya adalah 35.813 dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei dengan kuesioner. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keadilan umum, kepentingan pribadi, struktur tarif pajak, ketentuan-ketentuan yang diberlakukan khusus dan timbal balik dengan pemerintah secara simultan (simultan) berpengaruh terhadap motivasi seseorang dalam membayar pajak, namun secara parsial keadilan umum, kepentingan pribadi dan struktur tarif pajak tidak berpengaruh terhadap motivasi seseorang dalam membayar pajak, sedangkan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan khusus dan timbal balik dengan pemerintah berpengaruh terhadap motivasi seseorang dalam membayar pajak.

SUMMARY

Nirma Trianti, 2018, **The Effect of Tax Justice on Motivation of Individual Taxpayers in Paying Taxes** (Studies at Pacitan Tax Service, Counseling and Consultation Offices), Drs. Heru Susilo, MA, Latifah Hanum, SE, MSA, Ak. CA, 132 pages + xiii

This research was conducted on the basis of the many problems related to tax justice in the community. The problem of inequality in the distribution of tax charges that causes tax collection is not optimal for taxpayers. Policies made by the government so far are considered less effective or even tend to be misdirected as well as the tax amnesty policy whose purpose is to attract funds parked abroad by capitalists but in reality the largest portion is donated from domestic funds. Another problem is related to the amount of tariffs set by the government. In 2017 one of the most famous writers in Indonesia stated that he would not write more novels due to tax imposition on the writer which was too large and this was also justified by his fellow writers. All of these things ultimately affect a person's motivation in meeting their tax obligations.

This study wants to find out whether there is a general influence of justice, personal interests, tax rate structure, provisions that are specifically applied and reciprocal with the government on one's motivation in paying taxes on the Pacitan Regency KP2KP. The research method used in this research is quantitative with the type of research used is explanatory research. The number of population is 35,813 with a total sample of 100. The data collection method used is a survey method with a questionnaire. Data analysis using multiple linear regression with SPSS.

The results of the research show that general justice, personal interests, tax rate structure, provisions that are specifically enforced and reciprocal with the government simultaneously (simultaneously) affect the motivation of a person in paying taxes, but in part general justice, personal interests and tariff structure tax does not affect a person's motivation in paying taxes, while provisions that are specifically and reciprocally applied to the government affect a person's motivation in paying taxes.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Perpajakan Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof.Dr.Bambang Supriyono.,MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Ibu Dr.Saparilla Worokinasih,S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan
3. Bapak Dr.Heru Susilo, MA selaku pembimbing utama dan Ibu Latifah Hanum, SE.,MSA.,Ak.CA selaku dosen pembimbing kedua
4. Bapak Agus Nugroho selaku Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Pacitan
5. Ibu, Ayah dan kedua kakak tercinta atas dorongan dan doa yang tulus ikhlas mengiringi penulis selama menuntut ilmu
6. Rekan-rekan angkatan 2014 yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

Demi kesempatan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 2018

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
RINGKASAN.....	v
SUMMARY.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Empiris.....	13
B. Tinjauan Teoritis.....	18
1. Keadilan Pajak.....	18
2. Motivasi.....	25
C. Model Konsep.....	31
1. Hubungan Keadilan Terhadap Motivasi Secara Umum.....	31
D. Hipotesis.....	32
1. Hubungan Keadilan Umum Terhadap Motivasi Membayar Pajak/.....	32
2. Hubungan kepentingan Pribadi Terhadap Motivasi Membayar Pajak.....	33
3. Hubungan Struktur Tarif Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak.....	34
4. Hubungan Ketentuan yang Diberlakukan Khusus Terhadap Motivasi Membayar Pajak.....	35
5. Hubungan Timbal Balik Pemerintah Terhadap Motivasi Membayar Pajak.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Metode Penelitian.....	37



	B. Lokasi Penelitian	37
	C. Variabel dan Pengukuran.....	38
	D. Populasi dan Sampel.....	43
	E. Metode Pengumpulan Data.....	44
	F. Analisis Data.....	45
BAB IV	PEMBAHASAN.....	61
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	61
	1. Wilayah Kerja.....	61
	2. Kedudukan KP2KP Terhadap Instansi Vertikal.....	64
	3. Tugas dan Fungsi.....	65
	4. Visi dan Misi.....	65
	5. Motto Pelayanan dan Janji Pelayanan.....	66
	6. Kendala/Tantangan dan Inovasi.....	66
	7. Fasilitas Kantor.....	68
	8. Kondisi Sumber Daya Manusia.....	68
	B. Deskripsi Responden.....	69
	1. Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	69
	2. Identifikasi Responden Berdasarkan Usia.....	70
	3. Identifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	70
	4. Identifikasi Responden Berdasarkan Profesi.....	71
	C. Statistik Deskriptif.....	72
	1. Mean, Median, Modus, Deviasi Standard an Varian.....	72
	D. Uji Hipotesis.....	82
	1. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	82
	2. Uji Simultan (F).....	83
	3. Uji Parsial (t).....	84
BAB V	PENUTUP.....	91
	A. Kesimpulan.....	91
	B. Saran.....	92
	DAFTAR PUSTAKA.....	94
	LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 1	Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 2	Definisi Operasional Variabel.....	40
Tabel 3	Uji Validitas Keadilan Umum.....	48
Tabel 4	Uji Validitas Kepentingan Pribadi.....	49
Tabel 5	Uji Validitas Struktur Tarif Pajak.....	49
Tabel 6	Uji Validitas Ketentuan yang Diberlakukan Khusus.....	50
Tabel 7	Uji Validitas Timbal Balik Pemerintah.....	50
Tabel 8	Uji Validitas Motivasi.....	51
Tabel 9	Uji Realibilitas Keadilan Umum.....	52
Tabel 10	Uji Realibilitas Kepentingan Pribadi.....	53
Tabel 11	Uji Realibilitas Struktur Tarif Pajak.....	53
Tabel 12	Uji Realibilitas Ketentuan Yang Diberlakukan Khusus.....	53
Tabel 13	Uji Realibilitas Timbal Balik Dengan Pemerintah.....	54
Tabel 14	Uji Realibilitas Motivasi.....	54
Tabel 15	Hasil Uji Multikolinearitas.....	55
Tabel 16	Uji Normalitas.....	57
Tabel 17	Kedudukan KP2KP Terhadap Instansi Vertikal.....	64
Tabel 18	Hasil Penyebaran Kuesioner.....	69
Tabel 19	Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	70
Tabel 20	Identifikasi Responden Berdasarkan Usia.....	70
Tabel 21	Identifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	71
Tabel 22	Identifikasi Responden Berdasarkan Profesi.....	71
Tabel 23	Statistik Deskriptif Keadilan Umum.....	72
Tabel 24	Statistik Deskriptif Kepentingan Pribadi.....	73
Tabel 25	Statistik Deskriptif Struktur Tarif Pajak.....	73
Tabel 26	Statistik Deskriptif Ketentuan yang Diberlakukan Khusus.....	74
Tabel 27	Statistik Deskriptif Timbal Balik Dengan Pemerintah.....	75
Tabel 28	Statistik Deskriptif Motivasi.....	75
Tabel 29	Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Keadilan Umum.....	76
Tabel 30	Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Kepentingan Pribadi.....	77
Tabel 31	Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Struktur Tarif Pajak.....	78
Tabel 32	Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Ketentuan-Ketentuan Yang Diberlakukan Khusus.....	79
Tabel 33	Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Timbal Balik Dengan Pemerintah.....	80
Tabel 34	Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Motivasi Membayar Pajak.....	81
Tabel 35	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	82
Tabel 36	Uji Simultan (F).....	84
Tabel 37	Uji Parsial (t).....	85



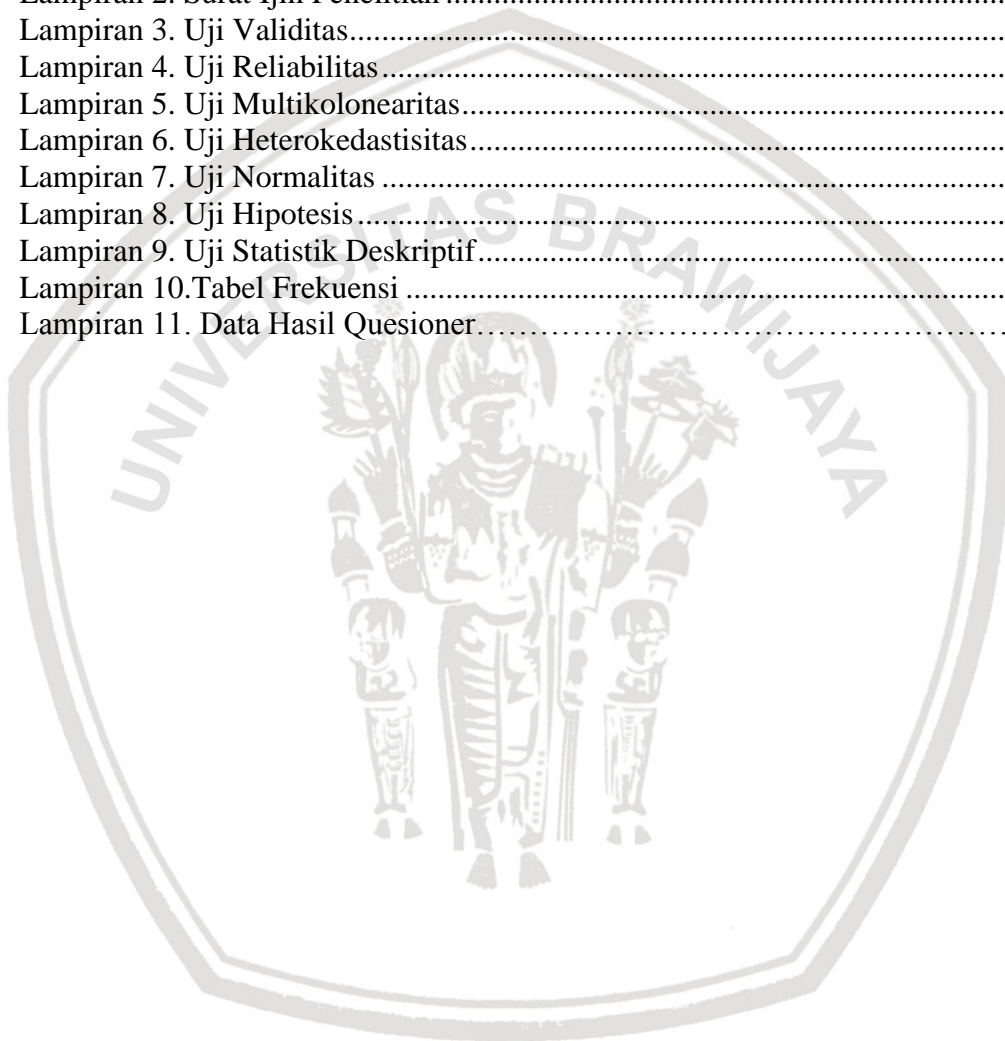
DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 1	Proses Timbulnya Motivasi.....	26
Gambar 2	Proses Motivasi.....	27
Gambar 3	Model Konseptual.....	32
Gambar 4	Model Hipotesis.....	36
Gambar 5	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	55
Gambar 6	Peta/Rute Pacitan.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Kuesioner.....	110
Lampiran 2.	Surat Ijin Penelitian	114
Lampiran 3.	Uji Validitas.....	115
Lampiran 4.	Uji Reliabilitas	122
Lampiran 5.	Uji Multikolinearitas.....	123
Lampiran 6.	Uji Heterokedastisitas.....	124
Lampiran 7.	Uji Normalitas	125
Lampiran 8.	Uji Hipotesis	125
Lampiran 9.	Uji Statistik Deskriptif.....	126
Lampiran 10.	Tabel Frekuensi	128
Lampiran 11.	Data Hasil Quesioner.....	137



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak melakukan adanya reformasi pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Kendala pada sistem *self assessment system* yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Kenyataannya sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih sangat rendah sehingga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa dihindari. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih rendah yakni 63 persen bahkan jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand (Ariyanti,2017). Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga dipengaruhi oleh motivasi seseorang dalam membayar pajak.

Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk mendorong timbulnya motivasi untuk berbuat baik (Suhartini, 2015:3). Apabila seseorang Wajib Pajak berfikir bahwa membayar pajak akan memberikan banyak keuntungan, ia akan berniat positif terhadap kewajiban perpajakannya oleh karena itu, Wajib Pajak akan menghindari tindakan tidak membayar pajak. Salah satu faktor yang memengaruhi motivasi Wajib Pajak juga karena adanya rasa ingin diperlakukan secara adil dan hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Asas keadilan dan kesamaan yang dimaksud dalam kebijakan perpajakan adalah

Wajib Pajak yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan beban pajak yang sama dan adil (Wisanggeni, 2016). Sama dan adil di sini dimaksudkan secara proporsional sesuai dengan manfaat dan kemampuan Wajib Pajak tersebut dalam membayar pajak.

Fenomena yang terjadi saat ini, kontribusi pajak penghasilan para pemilik perusahaan masih sangatlah minim, jauh lebih kecil dengan pajak penghasilan yang dibayarkan karyawan. Berdasarkan pemberitaan dalam salah satu media yaitu (id.beritasatu.com) menjelaskan data Bank Dunia menjelaskan bahwa sebesar 1% orang paling kaya di Indonesia menguasai sebesar 50,3% dari total kekayaan penduduk Indonesia. Jika lingkupnya diperluas sebesar 10% orang paling kaya di Indonesia menguasai sekitar 77% total kekayaan penduduk. Data Lembaga Penjamin Simpanan menyebutkan 56% dari total simpanan di bank dalam negeri senilai Rp2.352 triliun hanya dimiliki oleh 210.668 rekening atau 0,13% dari total rekening.

Berdasarkan data tersebut seharusnya orang yang sangat kaya berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak, namun kenyataannya berbanding berbalik. Tahun 2015, pajak penghasilan karyawan melalui PPh Pasal 21 mencapai Rp114,5 triliun. Namun yang terjadi dengan perusahaan dan orang pribadi yang memiliki bisnis atau perusahaan hanya sekitar Rp8,3 triliun (Wisanggeni, 2016). Penyebab kondisi ini diperjelas oleh pernyataan Guru Besar Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Gunadi yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak tidak mampu menjaring Wajib Pajak dari orang-orang yang sangat kaya karena instrumen untuk menjaringnya belum memadai.

Keadaan seperti ini seharusnya tidak terjadi dan perlu segera diperbaiki agar struktur ketidakadilan pajak dapat diselesaikan.

Fenomena lain terkait ketidakadilan yang dirasakan oleh Wajib Pajak yang membuatnya viral pada akhir tahun 2017 adalah berita terkait aturan pajak untuk profesi penulis. Tere Liye menyampaikan protes dalam media sosialnya, Tere Liye merupakan salah seorang penulis buku fiksi terkenal di Indonesia. Tere Liye menganggap adanya ketidakadilan di Indonesia atas pengenaan pajak yang cukup besar terhadap penulis. Tere Liye juga memutuskan untuk berhenti menerbitkan seluruh bukunya (Kusuma, 2017). Tere Liye menjelaskan bahwa penulis dengan penghasilan Rp1 miliar (belum dikurangi penghasilan tidak kena pajak), harus membayar pajak dengan besaran hampir seperempat penghasilannya tersebut.

Total pajaknya adalah Rp 245 juta karena tanpa Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) lalu dikalikan dengan pajak penghasilan progresif. 5% untuk Rp50 juta pertama, 15% untuk Rp50-250 juta berikutnya, lalu 25% untuk Rp250-500 juta berikutnya, lalu 30% untuk Rp500-1 miliar. Pangkal masalahnya terletak pada pembayaran PPh pasal 23 atau royalti penulis buku, yang dipotong 15% atas jumlah bruto. Umumnya jatah royalty penulis buku itu 10% dari penjualan dan ini cukup kecil (Maya, 2017). Protes yang sama juga disampaikan oleh sesama penulis yang mengeluh pengenaan pajak terhadap profesi penulis. Hal ini membuktikan bahwa rasa ketidakadilan yang dirasakan Wajib Pajak akan dapat memengaruhi motivasi Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Teori keadilan sebagai sebuah teori proses motivasi yang menjelaskan bagaimana motivasi seseorang individu untuk berperilaku dalam cara tertentu distimulasi oleh perasaan ketidakadilan atau kurang adil (Kreitner dan Kinichi, 2014:219). Hal tersebut menunjukkan pentingnya dimensi keadilan pajak sebagai variabel yang memengaruhi motivasi membayar pajak. Keadilan berasal dari kata dasar adil yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Keadilan pajak bermakna sifat yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku (Dharmawan, 2012).

Penelitian terkait keadilan pajak ini sudah pernah dilakukan diantaranya oleh Ricardson pada tahun 2006 dengan judul *The Impact of Tax Fairness Dimentions on Tax Complaince Behavior in an Asian Jurisdiction: The Case of Hongkong*. Azmi dan Perumal pada tahun 2008 dengan judul *Tax Fairness Dimentions in an Asian Context: the Malaysian Prespective*. Penelitian mengenai hal serupa juga telah dilakukan salah satunya yaitu terkait Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi oleh Dharmawan pada tahun 2012. Ketiga penelitian tersebut menggunakan variabel yang sama yaitu keadilan pajak dengan menguji lima dimensi dari keadilan pajak itu sendiri. Dimensi keadilan pajak diantaranya yaitu tingkat keadilan pajak secara umum (*general fairness*), timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*) dan struktur tarif pajak (*tax rate structures*).

Wajib Pajak akan patuh dalam membayar pajak apabila adanya unsur keadilan umum (*General Fairness*), dimana pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (Dharmawan, 2012). Hal ini sesuai dengan salah satu teori dalam pemungutan pajak yaitu teori daya pikul. Beban pajak harus sama beratnya untuk semua orang artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Terdapat dua pendekatan untuk mengukur daya pikul yaitu unsur objektif dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Unsur subjektif dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi (Mardiasmo, 2008).

Wajib Pajak juga akan memenuhi kewajiban perpajakannya karena adanya timbal balik pemerintah (*Exchange with Government*). Timbal balik tersebut sebagai kompensasi pembayaran pajak. Wajib Pajak berharap dengan membayar pajak dapat memajukan kehidupannya, dengan pajak yang mereka bayarkan harapannya dapat diikuti perbaikan pelayanan publik serta birokrasi (Dharmawan, 2012). Kenyataannya saat ini berbanding berbalik dengan teori, setiap hari di berbagai media sering kita jumpai berita terkait kasus-kasus yang melibatkan pejabat pemerintahan. Mulai dari kasus korupsi uang rakyat yang dilakukan para pemilik kekuasaan hingga berita buruknya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat serta permasalahan kemiskinan yang tidak kunjung usai keadaan ini jelas tidak memotivasi seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Novalius, 2018; Perwitasari, 2017).

Dimensi keadilan pajak selanjutnya adalah kepentingan pribadi (*self interest*), perilaku patuh dalam membayar pajak ini timbul karena Wajib Pajak berusaha untuk menaati semua peraturan yang tertuang pada hukum perpajakan yang berlaku saat ini, maka dengan begitu ada kepentingan pribadi untuk bisa terhindar dari sanksi (Dharmawan, 2012). Peraturan dan undang-undang perpajakan dibuat untuk mengatur mekanisme pelaksanaan pajak yang didalamnya memuat petunjuk pelaksanaan dan juga sanksi. Wajib Pajak akan cenderung terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sebab ada sanksi denda yang dinilai dapat merugikan. Semua hal tersebut dapat memengaruhi sikap dan pandangan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Seseorang akan terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena adanya ketentuan-ketentuan khusus (*special provisions*). Wajib Pajak akan taat apabila ketentuan-ketentuan yang tidak memihak pada Wajib Pajak tertentu saja namun mengedepankan unsur keadilan. Ketentuan tersebut misalnya pengurangan pajak harus berdasarkan peraturan yang adil (Dharmawan, 2012).

Terakhir, dimensi keadilan pajak yaitu terkait struktur tarif pajak (*tax rate structures*) dimana dorongan membayar pajak ini timbul karena adanya penerima penghasilan tinggi memiliki suatu kemampuan untuk membayar pajak penghasilan lebih besar daripada seseorang yang berpenghasilan rendah. Kemampuan seseorang mendorongnya untuk melakukan suatu upaya atau aktivitas tertentu (Tampubolon, 2012:193). Wajar jika Wajib Pajak dikenakan tarif proporsional dan hal ini harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak

yang ada. Pembagian tarif yang proposional diharapkan membantu dalam pencapaian target penerimaan pajak yang tidak membebankan Wajib Pajak.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur II mengejar target yang sudah ditetapkan oleh pusat yang pada tahun 2017 dengan capaian targetnya sebesar 98 persen. Kanwil DJP Jawa Timur II dibandingkan dengan Kanwil DJP Jawa Timur I dan III, masih termasuk terendah capaiannya di Provinsi Jawa Timur. Kanwil DJP Jawa Timur III misalnya, yang berhasil melampaui target mereka sebesar 100,33 persen (www.malangtimes.com). Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kanwil DJP Jawa Timur II motivasi Wajib Pajak untuk membayar pajak masih rendah dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain di Jawa Timur. Kanwil DJP Jawa Timur II membawahi sejumlah Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). KP2KP merupakan unit terkecil yang berada dibawah tanggung jawab KPP Pratama.

KPP Pratama tidak terdapat di semua daerah, namun ada sejumlah daerah yang disitu di tempatkan KP2KP dengan sejumlah pertimbangan. Ada kemungkinan daerah tersebut memiliki potensi pajak yang kecil dibandingkan daerah yang lain atau dengan pertimbangan lain. Alasan peneliti melakukan penelitian di KP2KP adalah ingin mengetahui pendapat dari Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai sampel yang digunakan sekaligus diharapkan dapat mewakili suara dari masyarakat pada umumnya sebab, KP2KP memiliki tugas utama untuk melakukan pelayanan, penyuluhan serta konsultasi perpajakan dan ini cakupannya lebih kecil lagi dari tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya bahwa banyak dari penelitian terdahulu membahas mengenai Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga belum ada yang meneliti secara langsung pengaruh dari keadilan terhadap motivasi membayar pajak. Terdapat salah satu penelitian yang dilakukan oleh Suhartini pada tahun 2015, yang menjadikan motivasi sebagai variabel *intervening*. Penelitian yang dilakukan berjudul Pengaruh Keadilan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Motivasi sebagai variabel *Intervening*. Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat keadilan umum sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap motivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak?
2. Apakah tingkat timbal balik yang diterima pemerintah sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap motivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak?
3. Apakah tingkat kepentingan pribadi sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap motivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak?

4. Apakah tingkat ketentuan-ketentuan yang diberlakukan khusus sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap motivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak?
5. Apakah tingkat struktur tarif pajak sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap motivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak?
6. Apakah kelima dimensi tersebut berpengaruh secara simultan terhadap motivasi membayar pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh tingkat keadilan umum sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap motivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak.
2. Mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh tingkat timbal balik yang diterima pemerintah sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap motivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak.
3. Mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh tingkat kepentingan pribadi sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap motivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak.
4. Mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh tingkat ketentuan-ketentuan yang diberlakukan khusus sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap motivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak.

5. Mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh tingkat struktur tarif pajak sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap motivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak.
6. Mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh kelima dimensi tersebut secara simultan terhadap motivasi membayar pajak?

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian yang berjudul Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Motivasi Membayar Pajak diharapkan mampu berkontribusi tidak hanya bagi peneliti namun untuk semua pihak yang terkait, antara lain:

1. Kontribusi Teoritis
 - a. Sebagai sarana untuk mewujudkan tri dharma perguruan tinggi yang salah satunya adalah penelitian. Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empiris, teori, konsep, metodologi, model atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. Sebagai sarana untuk menerapkan disiplin ilmu yang telah didapatkan dalam perkuliahan.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap studi lebih lanjut mengenai penelitian yang sama. Sekaligus dapat memberikan gambaran bagi penelitian selanjutnya dan memperkaya kajian ilmu pengetahuan tentang Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak.
2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Pacitan khususnya Kantor Pelayanan, Penyuluhan

dan Konsultasi Pajak (KP2KP) Pacitan dalam meningkatkan Motivasi dalam membayar pajak bagi Wajib Pajak.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan memberikan gambaran yang menyeluruh yang disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang permasalahan yang diteliti, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian bagi pihak-pihak yang terkait dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian mengenai kajian teoritis dan penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu menyangkut Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Motivasi Membayar Pajak.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu terdiri dari penjelasan terkait jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan pengukuran, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi responden, statistik deskriptif, uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas, uji

reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolonearitas dan uji hipotesis yang terdiri dari uji R^2 , uji F dan uji t.

BAB V PENUTUP

Penutup terdiri dari kesimpulan dan juga saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

1. Azmi dan Perumal (2008)

Penelitian ini berjudul "*Tax Fairness Dimentions in an Asian Context: The Malaysian Perspective*". Tujuan penelitian ini adalah menyelidiki apakah dimensi keadilan pajak serupa yang ada di negara-negara Barat juga ada di negara Asia. Variabel yang digunakan yaitu terdiri dari lima dimensi yaitu keadilan yang umum keadilan, struktur tingkat pajak, pertukaran dengan pemerintah, kepentingan diri sendiri dan ketentuan-ketentuan khusus orang kaya. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu kuesioner dengan jumlah 390 responden. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga dimensi keadilan pajak yang sedikit berbeda. Variabel tersebut adalah keadilan yang umum, struktur pajak dan kepentingan sendiri. Dimensi pendidikan dan budaya di Malaysia berbeda dibandingkan dengan negara-negara di Barat. Data dianalisis menggunakan SPSS sedangkan analisis deskriptif seperti mean dan deviasi standar juga digunakan. Uji realibilitas menggunakan *Cronbach Alpha*. Hasil dari penelitian ini adalah Responden menganggap sistem pajak di Malaysia cukup adil. Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa terdapat tiga dimensi keadilan pajak yang berpengaruh di Malaysia yaitu keadilan umum, struktur pajak dan kepentingan pribadi secara individu al berpengaruh terhadap motivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak dengan nilai signifikan masing-masing 0,014, 0,037 dan 0,002. Ketika dilakukan

pengujian secara bersama-sama semua variabel berpengaruh secara signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000.

2. Pris (2010)

Penelitian ini berjudul Dampak Dimensi Keadilan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Tujuannya untuk menguji dampak dimensi-dimensi keadilan pajak pada perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan (WP Badan). Richardson mengungkapkan bahwa keadilan pajak merupakan masalah multidimensional dan masalah budaya nasional yang berdampak pada perilaku kepatuhan pajak. Penelitian dilakukan dengan metode survei kuesioner pada staf perpajakan dan staf bagian akuntansi yang dianggap mewakili Wajib Pajak Badan dalam pengelolaan pajak di perusahaan.

Analisis *partial lease square* digunakan untuk mengidentifikasi dimensi keadilan pajak (keadilan umum, pertukaran dengan pemerintah, kepentingan pribadi, ketentuan-ketentuan khusus dan struktur tarif pajak) yang berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh dimensi keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap perilaku kepatuhan pajak. Budaya nasional dan tingkat pengetahuan pajak menjelaskan perbedaan hasil penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya.

3. Dharmawan (2012)

Penelitian ini berjudul Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara simultan maupun parsial tingkat keadilan secara umum (*general fairness*), timbal

balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*), dan struktur tarif pajak (*tax rate structures*) terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di Malang.

Populasinya adalah Wajib Pajak pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Malang Selatan sebanyak 12.956 Wajib Pajak pribadi dan sampel sebanyak 100 orang. Teknik pengambilan sampel adalah *convenience sampling* (sampel berdasarkan kemudahan). Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil analisis ditemukan bukti bahwa tingkat keadilan secara umum, timbal balik yang diterima pemerintah, kepentingan pribadi, ketentuan-ketentuan yang diberlakukan khusus dan struktur tarif pajak secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

4. Suhartini (2015)

Penelitian ini berjudul Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Motivasi sebagai Variabel *Intervening* dengan bertujuan untuk menguji pengaruh variabel kepatuhan pajak yang terdiri dari keadilan pajak, sanksi pajak dan motivasi sebagai variabel *intervening*. Penelitian dilakukan dengan menggunakan survei kuesioner wajib pajak perusahaan di KPP Madya Pekanbaru. Ini menggunakan teknik *sampling incidental* dan memilih 100 sampel. Analisis menggunakan parsial dan simultan.

Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa keadilan sistem pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dan motivasi, motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan

pajak. Keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui motivasi. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap motivasi. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui motivasi

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama/Tahun	Variabel	Analisis Data	Hasil
Azmi dan Perumal (2008)	5 dimensi keadilan pajak yaitu keadilan yang umum keadilan, struktur tingkat pajak, pertukaran dengan pemerintah, kepentingan diri sendiri dan ketentuan-ketentuan khusus orang kaya.	Pengambilan data dengan kuesioner, skala likert, analisis data dengan SPSS	Responden menganggap sistem pajak di Malaysia cukup adil. Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa terdapat tiga dimensi keadilan pajak yang berpengaruh di Malaysia yaitu keadilan umum, struktur pajak dan kepentingan pribadi secara individu al berpengaruh terhadap motivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak dengan nilai signifikan masing-masing 0,014, 0,037 dan 0,002. Ketika dilakukan pengujian secara bersama-sama semua variabel berpengaruh secara signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000.

Nama/Tahun	Variabel	Analisis Data	Hasil
Pris (2010)	Variabel independen: dampak dimensi keadilan pajak, variabel dependen: kepatuhan Wajib Pajak	Metode survei kuesioner dengan analisis <i>partial lease square</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh dimensi keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap perilaku kepatuhan pajak. budaya nasional dan tingkat pengetahuan pajak menjelaskan perbedaan hasil penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya.
Dharmawan (2012)	Variabel independen: keadilan secara umum (<i>general fairness</i>), timbal balik yang diterima pemerintah (<i>exchanges with government</i>), kepentingan pribadi (<i>self interest</i>), ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (<i>special provisions</i>), dan struktur tarif pajak (<i>tax rate structures</i>) dan Variabel dependen: kepatuhan Wajib Pajak Pribadi	Teknik pengambilan sampel adalah <i>convenience sampling</i> . Analisis data regresi linear berganda	Hasil analisis ditemukan bukti bahwa tingkat keadilan secara umum, timbal balik yang diterima pemerintah, kepentingan pribadi, ketentuan-ketentuan yang diberlakukan khusus dan struktur tarif pajak secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

Nama/Tahun	Variabel	Analisis Data	Hasil
Suhartini (2015)	Variabel dependen: kepatuhan pajak, variabel independen: keadilan pajak, sanksi pajak dan motivasi sebagai variabel <i>intervening</i>	Sampling <i>incidental</i> dan analisis menggunakan parsial dan simultan	Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa keadilan sistem pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dan motivasi, motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui motivasi. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap motivasi. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui motivasi.

Sumber: Data Olahan (2018)

B. Tinjauan Teoritis

1. Keadilan Pajak

a. Konsep Pajak

Definisi pajak menurut Soemitro pajak diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2008:1). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan
- b. Tanpa kontrapretasi langsung
- c. Pajak dipungut oleh pemerintah baik pusat maupun daerah
- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah

b. Asas Keadilan dalam Pemungutan Pajak

Berdasarkan Waluyo (2017:14) pemungutan pajak memiliki asas-asas yang sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith yang menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

a. *Equity* (keadilan)

Pemungutan pajak harus adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diterimanya.

b. *Certainty* (kepastian hukum)

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang pihak otoritas pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran.

c. *Convenience* (saat yang tepat)

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Contohnya, pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan.

d. *Economy of Collection* (asas hemat)

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimal mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

Asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan perpajakan maupun dalam hal pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif.

Menurut Richard A Musgrave dan Peggy B Musgrave dalam (Waluyo, 2017:14)

terdapat dua macam asas keadilan pemungutan pajak, adalah sebagai berikut:

a. *Benefit Principle*

Menurut sistem perpajakan yang adil, setiap Wajib Pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah.

b. *Ability Principle*

Pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada Wajib Pajak atas dasar kemampuan membayar.

Asas pemungutan lainnya juga dikemukakan oleh Due dalam Waluyo (2017:15) menyatakan bahwa pajak itu harus netral artinya tidak memengaruhi pilihan masyarakat untuk mengkonsumsi atau memproduksi barang. Tujuannya untuk menjaga agar pemungutan pajak tidak mengganggu kemajuan ekonomi. Namun, dimungkinkan kebijakan pemerintah justru dibuat untuk memengaruhi konsumsi masyarakat.

c. **Keadilan Pajak**

Keadilan berasal dari kata dasar adil yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Keadilan pajak bermakna sifat yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku (Dharmawan, 2012). Menurut John F Due keadilan dalam perpajakan adalah masalah pertimbangan nilai dan tidaklah mungkin untuk melakukan pendekatan ilmiah guna merumuskan konsep keadilan tersebut. Ukuran keadilan dalam perpajakan ditentukan semata-mata pandangan atau konsensus yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri (Diana, 2017:67).

Sistem pajak yang adil adalah adanya perlakuan yang sama terhadap orang/badan yang berada dalam situasi ekonomi yang sama misalnya mempunyai penghasilan tahunan yang sama dan memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap orang atau badan dalam keadaan ekonomi yang berbeda-beda.

Berdasarkan Pohan (2014:120) keadaan ekonomi yang berbeda-beda yang dimaksud dalam keadilan sendiri dalam perpajakan dikenal 2 (dua) macam yaitu:

- a. Keadilan Horizontal mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pajak harus secara umum dan merata yang berarti semua orang mempunyai kemampuan ekonomis atau yang mendapatkan tambahan kemampuan ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama.
- b. Keadilan Vertikal pada hakikatnya berkenaan dengan kewajiban membayar pajak yang berkemampuan membayarnya tidak sama yaitu semakin besar kemampuannya untuk membayar pajak harus semakin besar tarif pajak yang dikenakan.

Oleh karena itu, keadilan horizontal menyangkut pengertian penghasilan sedangkan keadilan vertikal menyangkut struktur tarif.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008) melakukan analisis faktor atas survei yang dilakukan di Malaysia dan mengidentifikasi lima dimensi dalam keadilan pajak yaitu:

1. *General Fairness* adalah pajak yang dikenakan harus sebanding dengan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Dimensi ini menyangkut keadilan pendistribusian pajak dari berbagai kalangan yang mengandung arti bahwa setiap orang yang berada dalam keadilan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Tidak berarti semua orang dikenakan sama walaupun penghasilannya sama tapi setiap orang yang punya Penghasilan Kena Pajak sama akan dikenakan pajak sama.

2. *Self Interest* (Kepentingan Pribadi) adalah perilaku patuh seseorang dalam memenuhi kewajiban pajaknya karena adanya kepentingan pribadi misal terhindar dari sanksi, denda dll;
3. *Special Provision for Wealthy* (Ketentuan-ketentuan Khusus) adalah peraturan atau ketentuan yang ada tidak memihak pada Wajib Pajak tertentu saja. Keadaan dalam perpajakan menghendaki penerapan suatu standar yang berpegang kepada kebebasan atau ketentuan khusus dan tidak memihak, misalnya standar kinerja apa yang digunakan untuk menetapkan besarnya pajak penghasilan apakah akan dikenakan persentase yang sama terhadap semua tingkat penghasilan atau persentasenya meningkatkan apabila penghasilannya bertambah tinggi. Apakah akan diadakan perbedaan pengenaan beban pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dengan badan, untuk mengurangi beban pajak berganda.
4. *Tax Rate* (Tarif Pajak) adalah keadilan dari sisi tarif pajak, seseorang yang berpenghasilan tinggi memiliki kemampuan membayar lebih besar dari pada yang berpenghasilan rendah. Tarif dikatakan sebagai daerah yang sensitif karena tarif mencerminkan keadilan. Orang akan membayar pajak jika ia merasa adil. Ukuran keadilan ini adalah ukuran pribadi masing-masing sehingga sangat relative atau subjektif. Pemungutan pajak tidak lepas dari keadilan yang dengan adanya keadilan dapat diciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Penetapan tariff harus berdasarkan keadilan sebab tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.

5. *Exchange with Governance* (Timbal Balik Pemerintah) adalah dimensi ini Wajib Pajak mengharapkan timbal balik atas pajak yang telah mereka bayarkan. Pajak yang dipungutan oleh negara harus digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Hal ini dapat pula berupa beragam fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum.

Menurut Adam Smith dalam Pohan (2014:120), prinsip paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan yang dinyatakan dengan suatu pernyataan bahwa setiap warga negara hendaknya berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara. Asas keadilan yang disebut oleh Adam Smith sebagai *The Equity Principle* (salah satu dari teori *Four Maxims/ Cannon* yang dicetuskan oleh Adam Smith) yaitu bahwa pemungutan pajak harus dibebankan secara adil. Pertama, pajak itu harus dibebankan kepada masyarakat berdasarkan manfaat yang dinikmati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Kedua, apabila masih diperlukan penerimaan lebih besar sedangkan manfaat dari belanja negara tersebut yang dinikmati masing-masing orang tidak dapat ditentukan seperti, pertahanan nasional, serta belanja negara untuk membeli sembako guna dibagikan kepada rakyat miskin, maka pajak dipungut dari masyarakat berdasarkan kemampuan membayar masing-masing Wajib Pajak.

Teori tersebut selanjutnya dikembangkan oleh Adolf Wegner seorang ahli ekonomi berkebangsaan Jerman tahun (1835-1917) yang mengemukakan bahwa pemungutan pajak yang adil adalah pemungutan pajak yang diberlakukan secara umum kepada semua Wajib Pajak dan dibebankan

kepada setiap Wajib Pajak yang mempunyai *ability to pay* secara merata. Satu struktur tarif pajak berlaku kepada setiap Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan untuk membayar. Semakin besar *ability to pay* seorang Wajib Pajak, semakin besar persentase pajak yang harus dibayar (Pohan, 2014:120).

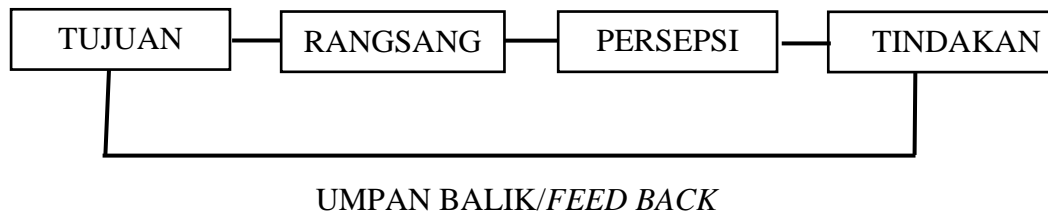
Isu keadilan merupakan isu yang aktual sepanjang zaman, dari sejak dulu sampai sekarang di belahan dunia manapun isu keadilan ini tetap menjadi salah satu fokus utama yang diangkat dalam berbagai kajian perpajakan yang pada akhirnya bermuara pada bagaimana suatu negara dapat mewujudkan keadilan tersebut bagi seluruh rakyatnya, esensinya menyangkut kemaslahatan umat. Pohan (2014:119) menyatakan, sejarah membuktikan bahwa ketidakadilan dalam pemungutan pajak dapat menimbulkan revolusi, seperti halnya Perancis, ketika terjadi revolusi Perancis (1789-1799) yang pada saat itu terdapat perbedaan mencolok antara rakyat miskin dan bangsawan. Rakyat miskin saat itu dikenai berbagai macam pajak sedangkan bangsawan dibebaskan dari pajak. Rakyat miskin akhirnya memperoleh kemenangan dalam revolusi tersebut. Berdasarkan hal tersebut diciptakanlah suatu asas perpajakan yakni pajak harus bersifat umum dan merata karena hanya dengan kedua asas itulah pajak dapat menyentuh rasa keadilan masyarakat.

2. Motivasi

Berdasarkan Mohyi (2012:136) menyatakan bahwa:

Perbuatan dapat berupa pemikiran (*thinking*) dan tindakan (*acting*). Pemikiran adalah perbuatan yang mengandalkan kerja atau daya pikir manusia sedangkan tindakan adalah perbuatan jasmani menggunakan gerak tubuh manusia untuk melakukannya. Proses perilaku atau tindakan manusia pada dasarnya berangkat dari adanya tujuan didalam diri manusia, dalam berusaha memenuhi mencapai tujuan tersebut. Ada beberapa faktor yang berpengaruh yang (stimulan) yang dapat merangsang jiwa manusia untuk mempresepsikan (menanggapi) dan presepsi ini kemudian diungkapkan dengan perbuatan berupa tindakan (perilaku).

Jadi, proses perilaku manusia dapat digambarkan seperti pada gambar berikut:



Gambar 1. Proses Timbulnya Motivasi

Sumber: Mohyi (2012:136)

Berdasarkan Hasibuan (2012:14) mendefinisikan motivasi sebagai kata yang berasal dari bahasa latin “*movere*” yang berarti dorongan atau menggerakkan. Menurut Kreitner dan Kinicki (2014) mendefinisikan motivasi (*motivation*) merepresentasikan proses-proses psikologis yang menyebabkan stimulasi, arahan, dan kegigihan terhadap sebuah kegiatan yang dilakukan secara sukarela yang diarahkan pada suatu tujuan. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan jika motivasi merupakan sebuah dorongan, stimulasi atau rangsangan yang menjadikan seseorang berperilaku secara sadar dan sukarela untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan.

Proses timbulnya motivasi seseorang dijelaskan dalam Ardana, Mujiati dan Sriathi (2013) yaitu:

- a. Kebutuhan yang belum terpenuhi;
- b. Mencari dan memilih cara-cara untuk memuaskan kebutuhan (di sini akan terlibat kemampuan, keterampilan dan pengalaman);
- c. Perilaku yang diarahkan pada tujuan;
- d. Evaluasi prestasi;
- e. Imbalan atau hukuman;
- f. Kepuasan;
- g. Menilai kembali kebutuhan yang belum terpenuhi.

Luthans (2005:270) dalam bukunya yang berjudul *Organizational Behavior* menggambarkan proses motivasi dasar sebagai berikut:



Gambar 2. Proses Motivasi

Sumber: Luthans (2005:270)

Kebutuhan muncul saat tidak ada keseimbangan fisiologis atau psikologis misalnya kebutuhan saat sel-sel tubuh kehilangan makanan atau cairan. Terbentuklah dorongan untuk memenuhi atau mengurangi kebutuhan tersebut contohnya, kebutuhan makan atau minum memunculkan dorongan lapar dan haus. Insentif merupakan hasil yang diinginkan misalnya hasil dari makan dan minum itu mengurangi kebutuhan dan dorongan. Pentingnya motivasi adalah karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia (Hasibuan, 2012:14).

Berdasarkan Ardana, Mujiati dan Sriathi (2013) ada beberapa faktor yang memengaruhi motivasi seseorang hal ini menurut karakteristik individu diantaranya yaitu:

- a. Minat;
- b. Sikap terhadap diri sendiri, pekerjaan dan situasi pekerjaan;
- c. Kebutuhan individual;
- d. Pengetahuan tentang pekerjaan;
- e. Emosi, suasana hati, perasaan keyakinan dan nilai-nilai.

Kreitner dan Kinicki (2014:213-227) dalam bukunya *Perilaku Organisasi (Organizational Behavior)* menjelaskan teori-teori yang terkait dengan motivasi diantaranya adalah:

a. Teori Keadilan J. Stacy Adams

Teori-teori yang membahas mengenai motivasi ada beberapa macam yang sering disebut teori keadilan (*equity theory*). Teori ekuitas ini dikembangkan oleh J. Stacy Adams. Berdasarkan Kreitner dan Kinicki (2014:219-221) teori keadilan

(*equity theory*) merupakan model motivasi yang menjelaskan bagaimana orang-orang berjuang untuk diperlakukan secara sama dan adil dalam interaksi sosial atau hubungan memberi dan menerima. Teori keadilan menjelaskan bagaimana seorang individu untuk berperilaku dalam cara tertentu distimulasi oleh perasaan ketidakadilan atau kurangnya keadilan. Teori ini membahas persepsi individu tentang seberapa adil mereka diperlakukan dibandingkan dengan orang lain. Seseorang akan cenderung membandingkan antara:

- a. Masukan-masukan yang mereka berikan pada pekerjaannya, misalnya dalam bentuk pendidikan, usaha yang dilakukan, pengalaman dan kemampuannya.
- b. Hasil-hasil yang mereka terima baik itu penghargaan atau kompensasi, pengakuan (rekognisi), tunjangan dan promosi. Mereka membandingkan balas jasa yang diterimanya dengan yang diterima oleh karyawan lainnya.

Hasil-hasil dari perbandingan tersebut, bila mereka merasa terjadi ketidakadilan maka perilaku mereka cenderung negatif sebaliknya bila mereka merasa terjadi keadilan kecenderungan perilakunya positif (Mohyi. 2012:146).

Kreitner dan Kinicki (2014:220-221) menjelaskan mengenai ketidakadilan positif yang merupakan perbandingan di mana orang lain menerima hasil yang lebih sedikit atas masukan yang serupa sedangkan ketidakadilan negatif merupakan perbandingan dimana orang lain menerima hasil yang lebih besar atas masukan yang serupa. Lebih luas lagi terkait konsep keadilan adalah mengenai keadilan dalam berorganisasi. Akhir tahun 1970 an, para peneliti mulai mengembangkan peranan teori keadilan dalam menjelaskan sikap dan perilaku pegawai. Penelitian ini mengarah kepada yang disebut sebagai *organizational justice*, keadilan dalam berorganisasi merefleksikan penerimaan seseorang bahwa

mereka diperlakukan secara adil dalam pekerjaan. Keadilan dalam berorganisasi memiliki tiga komponen yaitu:

- a. Keadilan Distributif: merefleksikan rasa keadilan yang diterima mengenai bagaimana sumber daya dan penghargaan didistribusikan atau dialokasikan.
- b. Keadilan Prosedural: didefinisikan sebagai rasa keadilan yang diterima mengenai proses dan prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan pendistribusian.
- c. Keadilan Interaksional: memiliki keterkaitan dengan kualitas perlakuan antarpribadi yang diterima orang-orang ketika prosedur diimplementasikan. Bentuk keadilan ini tidak berkenaan dengan hasil atau prosedur yang terkait dengan pengambilan keputusan, tetapi fokus pada apakah orang merasa diperlakukan secara adil ketika keputusan-keputusan diimplementasikan.

b. Teori Harapan Victor Vroom

Teori harapan (*expectancy theory*) beranggapan bahwa orang-orang termotivasi untuk berperilaku tertentu yang menimbulkan kombinasi yang dikehendaki terhadap hasil yang diinginkan. Teori harapan secara umum dapat digunakan untuk memperkirakan motivasi dan perilaku dalam situasi apapun dimana pilihan antara dua alternatif atau lebih harus diambil (Kreitner dan Kinicki, 2014:224-226). Teori Victor Vroom dirangkum sebagai berikut “kekuatan sebuah kecenderungan untuk melakukan sesuatu dalam cara tertentu bergantung pada kekuatan harapan bahwa perilaku tersebut akan diteruskan oleh konsekuensi tertentu (atau hasil) dan terhadap nilai atau keterkaitan konsekuensi tersebut (atau hasil) terhadap pelaku”.

Menurut Vroom, motivasi berujung pada keputusan seberapa banyak usaha yang dikeluarkan untuk situasi kerja tertentu. Pilihan ini berdasarkan pada dua tahapan harapan (usaha → kinerja dan kinerja → hasil). Pertama, motivasi dipengaruhi oleh harapan seseorang bahwa tingkatan usaha tertentu akan menghasilkan tujuan yang diinginkan. Motivasi juga dipengaruhi oleh perasaan yang diterima pegawai mengenai kesempatan mendapatkan berbagai hasil sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilannya mencapai tujuan kinerjanya. Masing-masing individu akan termotivasi hingga cakupan hasil yang mereka terima. Terdapat tiga konsep dalam model Vroom yaitu:

1. Harapan

Menurut terminology Vroom, harapan (*expectancy*) merepresentasikan kepercayaan seseorang bahwa sebuah tingkatan usaha akan diikuti dengan tingkatan kinerja tertentu. Faktor-faktor yang memengaruhi adalah kepercayaan diri, efektivitas diri, kesuksesan pada tugas sebelumnya, bantuan yang diterima dari atasan dan bawahan, informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dan bahan serta peralatan yang baik untuk menunjang pekerjaan.

2. *Instrumentality*

Merepresentasikan kepercayaan seseorang bahwa suatu hasil tidak dapat diduga melalui penyelesaian suatu kinerja tertentu. Pencapaian sebuah hasil seluruhnya bergantung pada kinerja sebuah pekerjaan.

3. Valensi

Istilah menurut Vroom, valensi mengarah pada nilai positif atau negatif yang dirujuk oleh orang-orang terhadap sebuah hasil. Valensi merefleksikan pilihan

pribadi kita. Contohnya, sebagian besar pegawai memiliki valensi positif terhadap penerimaan tambahan uang atau pengakuan. Berdasarkan model harapan Vroom, hasil mengarah pada konsekuensi berbeda yang tidak terduga terhadap kinerja seperti gaji, promosi atau pengakuan.

Berdasarkan Sardiman dalam (Suprihanto, 2014:78-79) *motivasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar.*

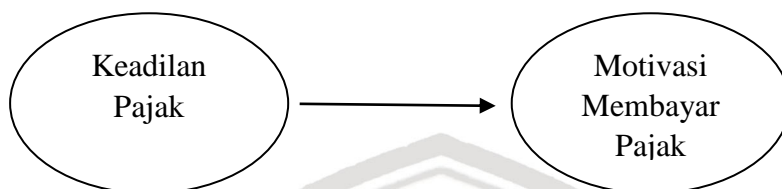
C. Model Konsep

1. Hubungan Keadilan terhadap Motivasi secara Umum

Ivancevich, Konopaske dan Matteson (2006:159) menyatakan bahwa teori keadilan menjelaskan bagaimana persepsi seseorang mengenai seberapa adil mereka diperlakukan dalam transaksi sosial dapat memengaruhi motivasi mereka. Konsep motivasi ini dalam teori motivasi didasarkan pada asumsi bahwa individu termotivasi oleh keinginan untuk diperlakukan secara sama. Kesimpulannya, seseorang yang diperlakukan dengan adil akan memengaruhi motivasi mereka dalam melakukan sesuatu perbuatan.

Penelitian ini mengkaji hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Keadilan pajak dapat disimbolkan dengan “X” sebagai variabel bebasnya sedangkan motivasi disimbolkan “Y” sebagai variabel terikat. Hubungan antara keadilan pajak dengan motivasi membayar pajak adalah hubungan yang saling memengaruhi dalam bentuk prediksi X memengaruhi Y. Arah hubungan antar

variabel adalah hubungan positif dimana nilai tertinggi pada variabel sebab sama dengan nilai tertinggi pada variabel akibat.



Gambar 3. Model Konseptual

Sumber: *Sumber Olahan, 2018*

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan prediksi-prediksi yang dibuat peneliti tentang hubungan antarvariabel yang ia harapkan. Menguji hipotesis berarti menerapkan prosedur-prosedur statistik dimana didalamnya peneliti mendeskripsikan dugaan-dugaannya terhadap populasi dan sampel penelitian (Creswell, 2016:191). Rumusan hipotesis dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Keadilan Umum Berpengaruh Terhadap Motivasi Membayar Pajak

Keadilan umum terkait dengan keadilan menyeluruh atas sistem perpajakan dan distribusi pajak. Ricardson dalam Anggraeni (2013) menjelaskan bahwa keadilan umum dalam sistem pajak merupakan keadaan keseluruhan lapisan masyarakat secara sadar menyadari bahwa sistem pajak yang dilakukan pemerintah selama ini sudah efektif dan efisien sehingga masyarakat dapat secara langsung merasakan dampak positif dan pembayaran pajak yang mereka bayarkan kepada negara. Beban pajak tidak boleh menjadi hal yang mencekik bagi seorang

Wajib Pajak dikarenakan beban pajak yang dikenakan tidak sesuai dengan jumlah penghasilan yang diperoleh setiap tahunnya.

Keadilan umum yang termasuk didalamnya distribusi beban pajak berpengaruh dalam mendorong atau memotivasi seseorang untuk berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak akan cenderung melakukan penghindaran pajak sehingga angka kepatuhan pajaknya kecil apabila dimensi ini tidak terpenuhi. Teori yang dikembangkan oleh Adolf Wegner seorang ahli ekonomi berkebangsaan Jerman tahun (1835-1917) mengemukakan bahwa pemungutan pajak yang adil adalah pemungutan pajak yang diberlakukan secara umum kepada semua Wajib Pajak dan dibebankan kepada setiap Wajib Pajak yang mempunyai *ability to pay* yang sama secara merata. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesisnya yaitu H1: keadilan umum berpengaruh terhadap motivasi membayar pajak.

2. Kepentingan Pribadi Berpengaruh Terhadap Motivasi Membayar Pajak

Dimensi ini terkait dengan persepsi apakah jumlah pajak yang dibayarkan Wajib pajak secara pribadi terlalu tinggi dan jika dibandingkan dengan Wajib Pajak lainnya. Seseorang dengan penghasilan tinggi, tetapi membayar pajak yang kecil atau sebaliknya akan menimbulkan suatu paradigma yang negatif bagi beberapa pembayar pajak yang akan membuat Wajib Pajak tersebut memilih untuk mengurangi beban pajak yang mereka bayar atau malah tidak membayar pajak. Jika Wajib Pajak sudah merasa bahwa beban pajak yang dibayarkan sudah sebanding dengan penghasilannya dan juga jika dibandingkan dengan Wajib Pajak yang lain, akan timbul motivasi yang baik dari dalam dirinya untuk cenderung

patuh terhadap peraturan pajak yang ada. Kreitner dan Kinicki (2014:219-221) dalam bukunya menjelaskan bahwa *equity theory* merupakan model motivasi yang menjelaskan bagaimana orang-orang berjuang untuk diperlakukan secara sama dan adil dalam interaksi sosial atau hubungan memberi dan menerima. Teori keadilan menjelaskan bagaimana seorang individu untuk berperilaku dalam cara tertentu distimulasi oleh perasaan ketidakadilan. Teori ini membahas persepsi individu tentang seberapa adil mereka diperlakukan dibandingkan dengan orang lain. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesisnya yaitu H2: kepentingan pribadi berpengaruh terhadap motivasi membayar pajak.

3. Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Motivasi Membayar Pajak

Dimensi ini berhubungan dengan tarif pajak yang lebih disukai yang dikenakan kepada Wajib Pajak. Indonesia menganut tarif pajak progresif, semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula beban pajak yang akan dibebankan. Masyarakat akan merasa adil jika tarif pajak yang ada disesuaikan dengan tingkat penghasilan masing-masing. Teori Adolf Wegner dijelaskan bahwa pemungutan pajak yang adil adalah pemungutan pajak yang dibebankan secara umum kepada Wajib Pajak yang memiliki *ability to pay* secara merata. Satu struktur tarif pajak berlaku kepada setiap Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan untuk membayar. Semakin besar kemampuan seseorang membayar maka semakin besar persentase pajak yang harus dibayarkan. Pohan (2014:120) menjelaskan keadilan dalam perpajakan ada dua macam yang salah satunya adalah keadilan vertikal yang pada hakikatnya berkenaan dengan kewajiban membayar pajak yang berkemampuan membayarnya tidak sama yaitu

semakin besar kemampuannya untuk membayar pajak harus semakin besar tarif pajak yang dikenakan. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesisnya yaitu H3: struktur tarif pajak berpengaruh terhadap motivasi membayar pajak.

4. Ketentuan-Ketentuan Khusus Berpengaruh Terhadap Motivasi Membayar Pajak

Dimensi ketentuan-ketentuan khusus yang berhubungan dengan ketentuan pajak yang berlaku yang hanya diberikan kepada kelompok khusus, yang telah disesuaikan dengan aturan pemerintah. Adanya ketentuan khusus yang hanya berlaku pada sebagian kecil golongan masyarakat ini membuat paradigma yang senjang atau menimbulkan gap. Adanya ketentuan yang bersifat tidak adil ini akan membuat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk tidak membayar pajak karena merasa pemerintah hanya melindungi kepentingan satu pihak saja sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan penghindaran pajak.

Pohan (2014) menjelaskan bahwa sistem pajak yang adil adalah adanya perlakuan yang sama terhadap orang/badan yang berada dalam situasi ekonomi yang sama misalnya mempunyai penghasilan tahunan yang sama dan memberikan perlakuan yang berbeda-beda. Secara historis, isu keadilan merupakan isu yang menjadi salah satu fokus utama yang diangkat dalam berbagai kajian perpajakan sepanjang masa yang berujung kepada bagaimana suatu negara dapat mewujudkan keadilan tersebut bagi seluruh rakyatnya. Revolusi Perancis (1789) merupakan contoh nyata ketidakadilan yang dialami masyarakat bisa memengaruhi perilaku mereka bahkan sampai muncul revolusi. Perbedaan yang besar antara rakyat miskin yang mereka dibebani berbagai macam

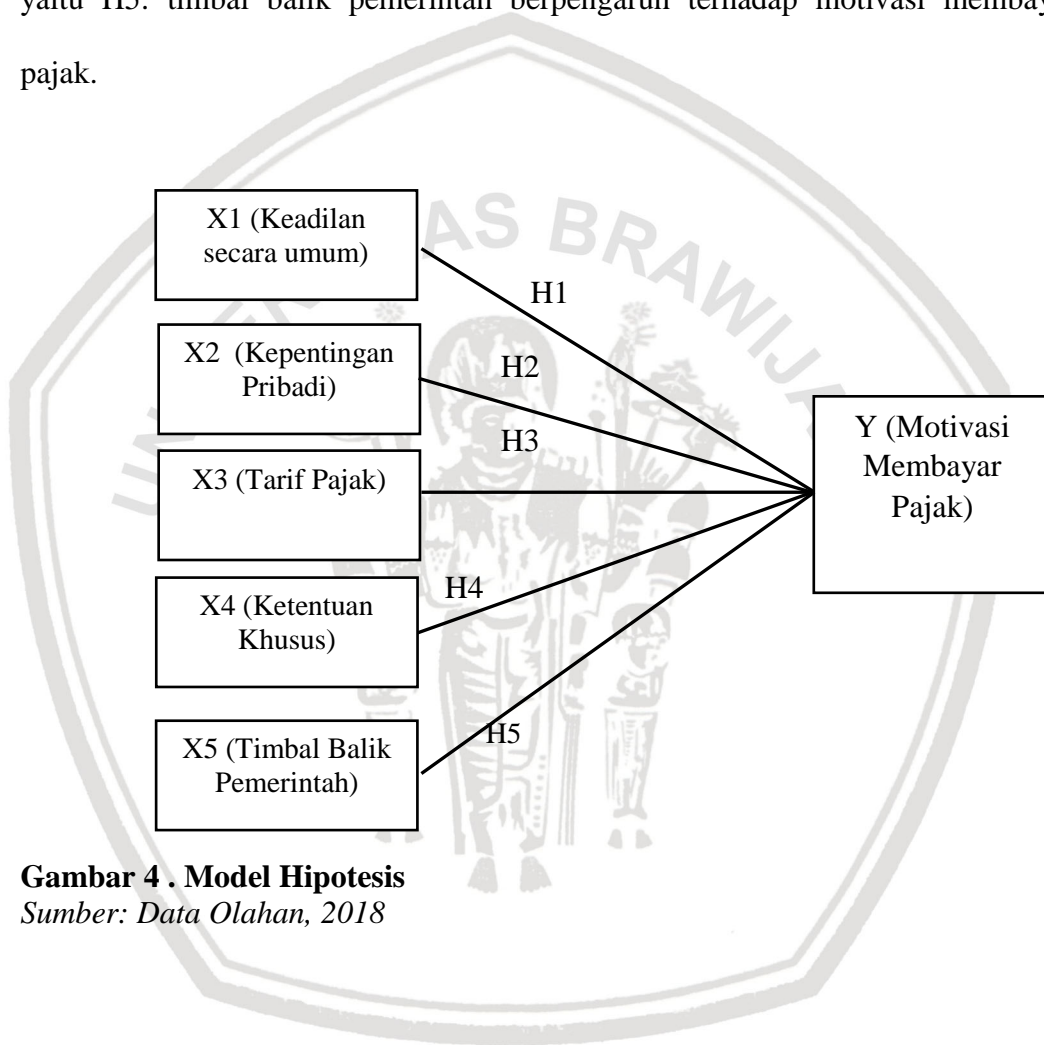
pajak, sedangkan bangsawan mereka dibebaskan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesisnya yaitu H4: ketentuan-ketentuan yang diberlakukan khusus berpengaruh terhadap motivasi membayar pajak.

5. Timbal Balik Pemerintah Berpengaruh Terhadap Motivasi Membayar Pajak

Dimensi timbal balik dengan pemerintah berhubungan dengan penyediaan fasilitas umum dan juga tatanan birokrasi yang baik yang dicapai pemerintah terhadap implikasi atas sejumlah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Ketersediaan fasilitas umum yang layak dan juga tatanan birokrasi yang baik dapat memengaruhi motivasi seseorang untuk berperilaku patuh terhadap kewajiban membayar pajak. Wajib Pajak terdorong untuk melakukan sesuatu dengan pertimbangan dan pandangan bahwa hal tersebut bermanfaat atautkah tidak sekaligus menguntungkan dirinya atautkah tidak.

Jika timbal balik pemerintah ini mendapat respon positif dari masyarakat yaitu seperti penyediaan fasilitas publik yang memadai dan juga dari birokrasinya pun juga baik maka akan semakin mendorong seseorang dengan sadar memenuhi kewajiban perpajakannya. Adam Smith dalam *the equity principle* sebagai salah satu dari teori *Four Maxims/Cannon* menjelaskan bahwa pajak itu harus dibebankan kepada masyarakat berdasarkan manfaat yang dinikmati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Prinsip utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan yang dinyatakan dengan suatu pernyataan bahwa setiap warga negara hendaknya berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan penghasilann yang diperolehnya

dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara. Berdasarkan teori yang dikemukakan Viktor Vroom, menurut dia harapan (*expentency*) merepresentasikan kepercayaan seseorang bahwa tingkatan usaha akan diikuti dengan tingkatan kerja tertentu. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesisnya yaitu H5: timbal balik pemerintah berpengaruh terhadap motivasi membayar pajak.



Gambar 4 . Model Hipotesis
Sumber: Data Olahan, 2018



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metodologi penelitian berisi pengetahuan yang mengkaji ketentuan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif berdasarkan Indriantoro dan Supomo (2009:12) merupakan penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian *explanatory research*. Penelitian eksplanatif dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat dan sifat hubungan sebab-akibat (Sugiyono, 2017:37). Penelitian ini dapat dilakukan untuk menilai dampak perubahan spesifik pada norma-norma yang ada, berbagai proses, dll. Studi berfokus pada analisis situasi atau masalah khusus untuk menjelaskan pola hubungan antar variabel. Metode penelitian ini dipilih sebab, penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada pengujian variabel-variabel dengan angka dan membutuhkan analisis data secara statistik.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan Noor (2017:31) lokasi penelitian adalah tempat dimana unit analisis penelitian berada. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pacitan, Jawa Timur. Kantor ini berlokasi di Jalan Cut Mutia No.4 Ploso, Kecamatan

Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63515. Kantor ini dipimpin oleh Bapak Agus Nugroho selaku Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pacitan. KP2KP ini dipilih sebab merupakan unit cabang terkecil dalam struktur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dibentuk dengan alasan di daerah tertentu tidak begitu besar potensinya ataupun dengan pertimbangan-pertimbangan lain dari pihak DJP sehingga persebaran kantor pajak tidak sama setiap daerah. Jawa Timur salah satu KP2KP terdapat di Kabupaten Pacitan.

C. Variabel dan Pengukuran

Penelitian kuantitatif pada umumnya membatasi faktor-faktor tertentu yang diamati dalam variabel-variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah tipe variabel yang menjelaskan atau memengaruhi variabel yang lain (Sugiyono, 2017:39). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu keadilan pajak "X" yang terdiri dari keadilan secara umum, tarif pajak, ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus, kepentingan pribadi dan timbal balik yang diterima pemerintah. Keadilan pajak secara umum (X1) adalah Wajib Pajak dikenakan pajak sesuai dengan kemampuannya dalam membayar kewajiban perpajakannya. Kepentingan pribadi (X2) juga memengaruhi dorongan seseorang dalam membayar pajak misal karena mereka tidak mau dikenai sanksi maka mereka membayar pajak tepat waktu. Struktur tarif pajak (X3) dimaknai bahwa keadilan itu bahwa yang berpenghasilan

tinggi membayar pajak yang lebih besar daripada yang berpenghasilan rendah. Adanya ketentuan-ketentuan yang diberlakukan khusus (X4) dimaknai bahwa semua aturan-aturan tersebut tidaklah memihak salah satu pihak saja. Timbal balik pemerintah (X5) yang setimpal misal dengan perbaikan pelayanan masyarakat maupun birokrasi.

2. Variabel Dependen

Berdasarkan Sugiyono (2017:39) menyatakan variabel dependen atau variabel terikat adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah motivasi membayar pajak (Y). Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan seseorang dalam melakukan sesuatu.

Pengukuran variabel independen dan dependen dalam penelitian ini menggunakan skala likert (*likert scale*). Berdasarkan Indriantoro dan Supomo (2009:104) skala likert merupakan metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu. Metode pengukuran yang paling sering digunakan ini dikembangkan oleh Rensis Likert sehingga dikenal dengan nama Skala Likert. Skala likert pada umumnya menggunakan lima angka penilaian yaitu: sangat setuju (1), setuju (2), netral atau tidak pasti (3), tidak setuju (4), sangat tidak setuju (5). Penjelasan terperinci mengenai definisi operasional variabel dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item	Sumber
Keadilan Pajak	Keadilan Umum (X1)	1. Keadilan Umum	1. Sistem pajak di Indonesia diatur secara adil untuk Wajib Pajak; 2. Pembebanan pajak didistribusikan secara adil kepada setiap Wajib Pajak; 3. Pajak yang dibebankan adil;	(Pris,2010)
	Kepentingan Pribadi (X2)	2. Kepentingan Pribadi	1. Hukum pajak mengharuskan untuk membayar lebih besar dibandingkan pembagian pajak penghasilan telah sesuai/adil; 2. Dibandingkan dengan Wajib Pajak lain, pajak yang dibayarkan lebih sedikit; 3. Dibandingkan dengan jumlah yang dibayarkan	

Konsep	Variabel	Indikator	Item	Sumber
			oleh Wajib Pajak yang lain pajak yang dibayarkan lebih besar;	
	Struktur tarif pajak (X3)	3. Struktur tarif pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerima penghasilan tinggi membayar pajak penghasilan lebih besar; 2. Tarif pajak proporsional adil; 3. Tarif pajak yang adil harus sama untuk setiap Wajib Pajak; 4. Pengenaan tarif pajak <i>flat</i> adalah adil. 	(Pris,2010)
	Ketentuan-ketentuan yang diberlakukan khusus (X4)	4. Ketentuan-ketentuan yang diberlakukan khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan-ketentuan khusus untuk Wajib Pajak tertentu tidak adil; 2. Pengurangan pajak hanya dapat digunakan oleh Wajib Pajak besar tidak adil; 3. Kebijakan 	(Pris,2010)

Konsep	Variabel	Indikator	Item	Sumber
			<p>pengampunan pajak yang dilakukan pemerintah untuk yang belum melaporkan hartanya itu tidak adil;</p> <p>4. Wajib Pajak yang memiliki penghasilan sama harus dikenakan pajak yang sama adalah tidak adil</p>	
	Timbal balik dengan pemerintah (X5)	5. Timbal balik dengan pemerintah	<p>1. Nilai manfaat yang diterima sesuai dan adil dengan pajak yang dibayarkan;</p> <p>2. Pajak penghasilan yang dibayarkan terlalu tinggi jika dibandingkan manfaat yang diterima;</p> <p>3. Manfaat yang diterima atas pembayaran pajak penghasilan telah</p>	(Pris,2010)

Konsep	Variabel	Indikator	Item	Sumber
			sesuai/adil;	
Motivasi	Motivasi Membayar Pajak (Y)	1. Motivasi Intrinsik	1. Kesadaran 2. Pengabdian kepada negara	(Dianawati, 2008) dan (Putri,2016)
		2. Motivasi Ekstrinsik	1. Dorongan aparat pajak 2. Pemerataan dan keadilan 3. Kewajiban warga negara 4. Fasilitas publik 5. Tarif pajak 6. Denda dan sanksi 7. Sosialisasi perpajakan	(Dianawati, 2008) dan (Putri,2016)

Sumber : Data Olahan, 2018

D. Populasi dan Sampel

Populasi (*population*) yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Peneliti dapat meneliti seluruh elemen populasi atau meneliti sebagian dari elemen-elemen populasi disebut dengan penelitian sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Penyuluhan, Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pacitan. Berdasarkan data yang diberikan oleh KP2KP diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar ada 35.813 orang sehingga populasi dalam

penelitian ini adalah 35.813 orang. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin. Sampel yang terlalu kecil dapat menyebabkan penelitian tidak dapat menggambarkan kondisi populasi yang sesungguhnya sebaliknya, sampel yang terlalu besar dapat mengakibatkan pemborosan biaya penelitian. Ukuran populasi sebesar 35.813 Wajib Pajak dan tingkat batas kesalahan 10 persen maka ukuran sampel dalam penelitian ini adalah:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad \longrightarrow \quad n = \frac{35.813}{(1 + 35.813 \times 0,1^2)} = 100 \text{ Wajib Pajak}$$

N : Jumlah Populasi

n : Jumlah Sampel

e : Batas Toleransi Kesalahan (*error tolerance*)

Setelah ditentukan jumlah sampel yang dihitung dengan menggunakan rumus Slovin, maka sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik *Convenience Sampling*. Penyebaran kuesioner pada responden yang dalam hal ini Wajib Pajak yang mudah ditemui. Teknik ini dapat dijangkau atau berada pada waktu yang tepat yaitu pada waktu melakukan pembayaran pajak.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dikumpulkan oleh peneliti dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan peneliti. Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis (Indriantoro dan Supomo, 2009:152). Metode ini memerlukan adanya kontak atau

hubungan antara peneliti dengan subjek (responden) penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data dalam metode survei dengan kuesioner.

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang pada kondisi tertentu kemungkinan tidak memerlukan kehadiran peneliti. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden dapat dikemukakan secara tertulis melalui suatu kuesioner. Teknik ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan. Kuesioner ini diberikan secara personal kepada responden sehingga peneliti dapat berhubungan langsung dengan responden dan menjelaskan seperlunya.

F. Analisis Data

Analisis data penelitian yang merupakan bagian dari pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Proses analisis data penelitian umumnya terdiri dari beberapa tahap yaitu akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa: frekuensi, tendensi sentral, dispersi dan koefisien korelasi antar variabel penelitian. Penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut adalah:

a. Frekuensi

Frekuensi merupakan salah satu ukuran dalam statistik deskriptif yang menunjukkan nilai distribusi data penelitian yang memiliki kesamaan kategori. Frekuensi suatu distribusi data penelitian dinyatakan dengan ukuran absolut (f) atau proporsi (%). Penyajian statistik deskriptif yang menggunakan ukuran frekuensi dapat menggunakan tabel numerik atau grafik.

b. Tendensi Sentral (rata-rata, median dan modus)

Tendensi sentral merupakan ukuran dalam statistik deskriptif yang menunjukkan nilai sentral dari distribusi data penelitian. Tendensi sentral dapat dinyatakan dengan tiga macam ukuran yaitu; mean, median dan modus. Mean merupakan pengukuran nilai sentral suatu distribusi data berdasarkan nilai rata-rata yang dihitung dengan cara membagi nilai hasil penjumlahan sekelompok data dengan jumlah data yang diteliti. Rumus mean adalah sebagai berikut:

$$\text{Rata-Rata Sampel} : \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Keterangan:

$\sum_{i=1}^n x_i$: merupakan notasi dari penjumlahan data $X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n$

n : jumlah sampel yang diteliti

Median merupakan nilai data yang terletak ditengah-tengah dari suatu distribusi data penelitian yang disusun secara berurutan sedangkan modus merupakan data yang memiliki frekuensi paling banyak dalam suatu distribusi data.

c. Dispersi (deviasi standard dan varian)

Dispersi mengukur variasi data yang diteliti dari angka rata-ratanya. Perbedaan antara nilai data yang diteliti dengan nilai rata-ratanya disebut dengan deviasi yang dihitung dengan rumus $d_i = (X_i - \bar{X})$. Ada berbagai cara untuk mengukur deviasi, antara lain: deviasi rata-rata, deviasi absolut rata-rata, deviasi kuadrat rata-rata, varian, deviasi standar. Rumus untuk deviasi rata adalah:

$$\text{Deviasi rata-rata} = \frac{\sum(x_i - \bar{x})}{n}$$

Rumus deviasi absolut rata-rata:

$$\text{Deviasi absolut rata-rata} = \frac{\sum |x_i - \bar{x}|}{n}$$

Rumus kuadrat absolut rata-rata:

$$\text{Deviasi kuadrat rata-rata} = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n}$$

Rumus Varians adalah sebagai berikut:

$$s^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{(n - 1)}$$

Rumus standar deviasi adalah sebagai berikut:

$$s = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{(n - 1)}}$$

2. Uji Validitas dan Realibilitas

Kesimpulan dalam penelitian yang berupa jawaban atau pemecahan masalah penelitian, dibuat berdasarkan hasil proses pengjian data yang meliputi: pemilihan, pengumpulan dan analisis data. Kesimpulan tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Ada dua konsep untuk mengukur kualitas data, yaitu reliabilitas dan

validitas. Dua konsep ini digunakan agar penelitian dihasilkan berupa kesimpulan yang tidak bias seperti kurang *reliable* dan *valid*. Kualitas data penelitian ditentukan oleh kualitas instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data.

a. Uji Validitas

Setiap penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode angket perlu dilakukan uji validitas. Uji validitas ini berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian angket yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dari para responden. Uji validitas *product momen pearson correlation* menggunakan prinsip mengkorelasikan atau menghubungkan antara masing-masing skor item dengan skor total yang diperoleh dalam penelitian. Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan angka *r* hitung dengan *r* tabel. Jika *r* hitung lebih besar dari *r* tabel item dikatakan valid dan sebaliknya jika *r* hitung lebih kecil dari *r* tabel maka item dikatakan tidak valid. *r* hitung dicari dengan menggunakan program *Statistical Package for the Social Science* (SPSS) (Sanusi, 2010:77). Jika koefisien tiap faktor bernilai positif dan besarnya $\geq 0,30$ maka instrument tersebut dikatakan valid dan juga sebaliknya. Tabel berikut ini menunjukkan hasil uji validitas dari lima variabel dengan 96 sampel responden:

Tabel 3. Uji Validitas Keadilan Umum

No. Butir Pernyataan	Coefficient Correlation	Keterangan
1	0.871	Valid
2	0.824	Valid
3	0.529	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa, korelasi antara skor 1 dengan skor total adalah 0,871 antara butir 2 dengan skor total 0,824 dan butir 3 dengan

skor 0,529. Bila koefisien korelasi sama dengan 0,3 atau lebih (paling kecil 0,3), maka butir pernyataan dinyatakan valid. Dari uji coba tersebut ternyata koefisien korelasi semua butir dengan skor total lebih dari 0,3, sehingga semua butir instrumen keadilan umum dinyatakan valid butir yang memiliki validitas tertinggi adalah butir 1 dengan dengan koefisien korelasi 0,871 dan paling rendah butir 3 dengan koefisien korelasi 0,529.

Tabel 4. Uji Validitas Kepentingan Pribadi

No. Butir Pernyataan	Coefficient Correlation	Keterangan
4	0.664	Valid
5	0.752	Valid
6	0.695	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa, korelasi antara skor 4 dengan skor total adalah 0,664 antara butir 5 dengan skor total 0,752 dan butir 6 dengan skor 0,695. Bila koefisien korelasi sama dengan 0,3 atau lebih (paling kecil 0,3), maka butir pernyataan dinyatakan valid. Dari uji coba tersebut ternyata koefisien korelasi semua butir dengan skor total lebih dari 0,3, sehingga semua butir instrumen kepentingan pribadi dinyatakan valid. Butir yang memiliki validitas tertinggi adalah butir 5 dengan dengan koefisien korelasi 0,752 dan paling rendah butir 4 dengan koefisien korelasi 0,664.

Tabel 5. Uji Validitas Struktur Tarif Pajak

No. Butir Pernyataan	Coefficient Correlation	Keterangan
7	0.568	Valid
8	0.351	Valid
9	0.675	Valid
10	0.467	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa, korelasi antara skor 7 dengan skor total adalah 0,568 antara butir 8 dengan skor total 0,351, butir 9 dengan skor

0,675 dan butir 10 dengan skor 0.467. Bila koefisien korelasi sama dengan 0.3 atau lebih (paling kecil 0,3), maka butir pernyataan dinyatakan valid. Dari uji coba tersebut ternyata koefisien korelasi semua butir dengan skor total lebih dari atau sama dengan 0.3, sehingga semua butir instrumen struktur tarif pajak dinyatakan valid. Butir yang memiliki validitas tertinggi adalah butir 9 dengan koefisien korelasi 0,675 dan paling rendah butir 8 dengan koefisien korelasi 0,351.

Tabel 6. Uji Validitas Ketentuan-Ketentuan yang Diberlakukan Khusus

No. Butir Pernyataan	Coefficient Correlation	Keterangan
11	0.660	Valid
12	0.700	Valid
13	0.803	Valid
14	0.523	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa, korelasi antara skor 11 dengan skor total adalah 0,660 antara butir 12 dengan skor total 0,700, butir 13 dengan skor 0,803 dan butir 14 dengan skor 0.523. Bila koefisien korelasi sama dengan 0.3 atau lebih (paling kecil 0,3), maka butir pernyataan dinyatakan valid. Dari uji coba tersebut ternyata koefisien korelasi semua butir dengan skor total lebih dari atau sama dengan 0.3, sehingga semua butir instrumen ketentuan-ketentuan yang diberlakukan khusus dinyatakan valid.

Tabel 7. Uji Validitas Timbal Balik dengan Pemerintah

No. Butir Pernyataan	Coefficient Correlation	Keterangan
15	0.671	Valid
16	0.410	Valid
17	0.691	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa, korelasi antara skor 15 dengan skor total adalah 0,671 antara butir 16 dengan skor total 0,410 dan butir 17 dengan skor 0,691. Bila koefisien korelasi sama dengan 0,3 atau lebih (paling kecil 0,3), maka butir pernyataan dinyatakan valid. Dari uji coba tersebut ternyata koefisien korelasi semua butir dengan skor total lebih dari 0,3, sehingga semua butir instrumen timbal balik dengan pemerintah dinyatakan valid. Butir yang memiliki validitas tertinggi adalah butir 17 dengan dengan koefisien korelasi 0,691 dan paling rendah butir 16 dengan koefisien korelasi 0,410.

Tabel 8. Uji Validitas Motivasi

No. Butir Pernyataan	Coefficient Correlation	Keterangan
18	0.660	Valid
19	0.792	Valid
20	0.666	Valid
21	0.431	Valid
22	0.704	Valid
23	0.714	Valid
24	0.698	Valid
25	0.608	Valid
26	0.301	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa, korelasi antara skor 18 dengan skor total adalah 0,660 antara butir 19 dengan skor total 0,792, butir 20 dengan skor 0,666, butir 21 dengan skor 0,431, butir 22 dengan skor 0,704, butir 23 dengan skor 0,714, butir 24 dengan skor 0,698, butir 25 dengan skor 0,608 dan butir 26 dengan skor 0,301. Bila koefisien korelasi sama dengan 0,3 atau lebih (paling kecil 0,3), maka butir pernyataan dinyatakan valid. Dari uji coba tersebut ternyata koefisien korelasi semua butir dengan skor total lebih dari 0,3, sehingga semua butir instrumen motivasi dinyatakan valid. Butir yang memiliki validitas

tertinggi adalah butir 19 dengan dengan koefisien korelasi 0,792 dan paling rendah butir 26 dengan koefisien korelasi 0,301.

b. Uji Reliabilitas

Konsep reliabilitas menurut pendekatan ini adalah konsistensi diantara butir-butir pertanyaan atau pernyataan dalam suatu instrumen. Tingkat keterkaitan antar butir pertanyaan atau pernyataan dalam suatu instrumen untuk mengukur *construct* tertentu menunjukkan tingkat reliabilitas konsistensi internal instrumen yang bersangkutan. Peneliti hanya memerlukan sekali pengujian dengan menggunakan teknik statistik tertentu terhadap skor jawaban responden yang dihasilkan dari penggunaan instrumen yang bersangkutan.

Teknik yang dipakai dalam uji reliabilitas ini adalah *cronbach's Alpha*. Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan angka *cronbach alpha* dengan ketentuan nilai *cronbach alpha* minimal yaitu 0,6 artinya jika nilai *cronbach alpha* yang didapatkan dari hasil perhitungan SPSS lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan kuesioner tersebut reliabel, sebaliknya jika *cronbach alpha* lebih kecil dari 0,6, maka disimpulkan tidak reliabel (Indriantoro dan Supomo, 2009:181). Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan uji realibilitas terhadap 96 responden:

Tabel 9. Uji Reliabilitas Keadilan Umum

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.802	.821	4

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa variabel keadilan umum dapat dikatakan reliabel karena nilai alpha diatas 0,60 yaitu sebesar 0,774.

Tabel 10. Uji Reliabilitas Kepentingan Pribadi

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.774	.784	4

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan hasil pengujian realibilitas pada variabel kepentingan pribadi diketahui bahwa nilai alpha diatas 0,60 dengan nilai 0.774, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel tersebut reliabel.

Tabel 11. Uji Reliabilitas Struktur Tarif Pajak

Cronbach's Alpha	N of Items
.652	5

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan hasil pengujian realibilitas pada variabel struktur tarif pajak diketahui bahwa nilai alpha diatas 0,60 dengan nilai 0,652, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel tersebut reliabel.

Tabel 12. Uji Reliabilitas Ketentuan-Ketentuan yang Diberlakukan Khusus

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.764	.791	5

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan hasil pengujian realibilitas pada variabel ketentuan-ketentuan yang diberlakukan khusus diketahui bahwa nilai alpha diatas 0,60 dengan nilai 0,764, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel tersebut reliabel.

Tabel 13. Uji Reliabilitas Timbal Balik dengan Pemerintah

Cronbach's Alpha	N of Items
.647	4

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan hasil pengujian realibilitas pada variabel timbal balik dengan pemerintah diketahui bahwa nilai alpha diatas 0,60 dengan nilai 0.647, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel tersebut reliabel.

Tabel 14. Uji Reliabilitas Motivasi

Cronbach's Alpha	N of Items
.777	10

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan hasil pengujian realibilitas pada variabel timbal balik dengan pemerintah diketahui bahwa nilai alpha diatas 0,60 dengan nilai 0,777, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel tersebut reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menentukan apakah dalam suatu model regresi linear ganda terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi linear berganda yang baik seharusnya korelasi antar variabel independen adalah kecil atau justru sama sekali tidak ada. Model regresi linear ganda yang baik adalah yang tidak mengalami multikolinearitas. Salah satu cara menguji multikolinieritas adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai *tolerance* dan VIF merupakan nilai yang bisa menunjukkan

ada atau tidaknya multikolinearitas. Nilai *tolerance* harus 0,0 – 1 dan VIF tidak boleh lebih dari 10 (Ghazali, 2016:103).

Uji multikolonearitas bertujuan untuk menentukan apakah di model regresi linear ganda terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi linear berganda yang baik seharusnya korelasi antar variabel independen adalah kecil atau justru sama sekali tidak ada. Berikut ini hasil uji multikolonearitas semua variabel:

Tabel 15. Hasil Uji Multikolonearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
Keadilan Umum	0,754	1,326
Kepentingan Pribadi	0,819	1,220
Struktur Tarif Pajak	0,910	1,099
Ketentuan-Ketentuan yang Diberlakukan Khusus	0,710	1,409
Timbal Balik dengan Pemerintah	0,798	1,253

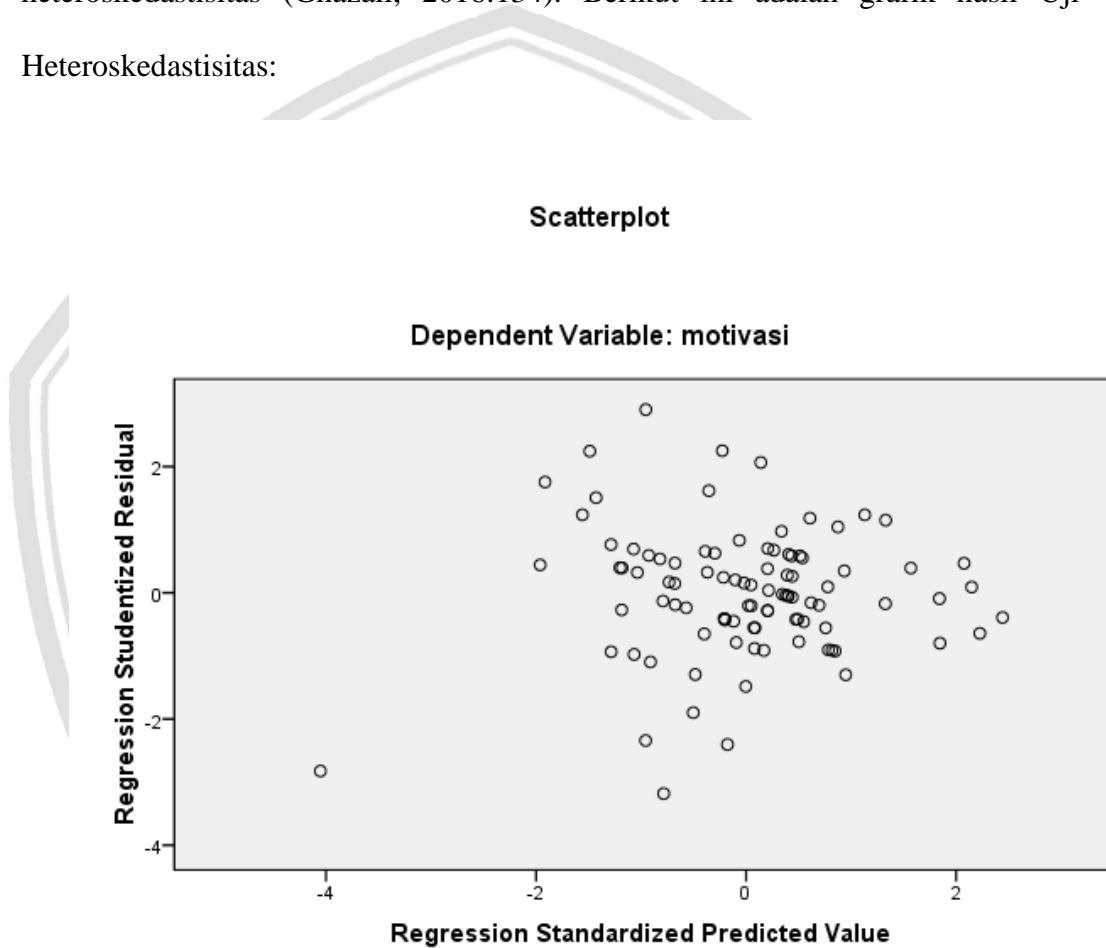
Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan tabel hasil uji multikolonearitas dapat diketahui melalui nilai *tolerance* dan VIF dari masing-masing variabel independen. Nilai VIF tidak boleh lebih dari 10 sedangkan nilai *tolerance* harus 0,0-1. Dari hal tersebut maka kelima variabel tersebut tidak mengalami multikolonearitas karena nilai VIF dan *tolerance* nya telah memenuhi standar.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi atau terdapat ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari hasil satu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut dengan homokedastisitas. Gejala heteroskedastisitas diuji dengan grafik scateerplot SPSS dengan cara melihat hasil grafik Scatterplot antara nilai prediksi

variabel independen yaitu ZPRED dengan residunya SRESID. Dasar pengambilan keputusannya apabila terdapat pola tertentu pada grafik Scatterplot SPSS seperti membentuk pola teratur, maka telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar maka indikasinya tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghazali, 2016:134). Berikut ini adalah grafik hasil Uji Heteroskedastisitas:



Gambar 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena titik meyebar diatas dan dibawah nilai angka nol dan tidak membentuk pola.

c. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data yang didapatkan mengikuti atau mendekati sebaran normal. Pris (2010) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model pengujian, variabel pengganggu (residual) terdistribusi normal. Salah satu uji alat uji statistik yang digunakan dalam menguji normalitas residual adalah uji statistik nonparametrik Kolmogorov- Smirnov. Data dapat dikatakan terdistribusi normal apabila nilai absolut “D”, Kolmogorov-Smirnov “Z” dan signifikan lebih dari 0,05 (5%) (Ghazali, 2016:170). Berikut ini hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov:

Tabel 16. Uji Normalitas

		Unstandarized Residual
N		96
Norma Parameters	Mean	.0000000
	Std.Deviation	3.02511216
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.084
	Negative	-.073
Kolmogorov-Smirnov Z		.824
Asymp. Sig. (2-tailed)		.506
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig	.482 ^c
99% Confidence Interval Lower Bound		.469
Upper Bound		.495

Sumber: *Data diolah (2018)*

Nilai *test* statistik Kolmogorov-Smirnov sebesar 0.824 dan signifikan pada 0.05 (0.506 > dari 0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal.

4. Uji Hipotesis

Berdasarkan Yusri (2016:73-77) analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila

terdapat lebih dari dua variabel, maka hubungan linear dapat dinyatakan dalam persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5$$

Keterangan:

Y	: Motivasi Membayar Pajak
X1	: Variabel Keadilan Umum
X2	: Variabel Kepentingan Pribadi
X3	: Variabel Struktur Tarif Pajak
X4	: Variabel Ketentuan yang Diberlakukan Khusus
X5	: Variabel Timbal Balik dengan Pemerintah
a	: Nilai Konstanta
b1, b2, b3, b4 dan b5	: Nilai Koefisien regresi variabel X1, X2, X3, X4 dan X5

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menjelaskan proporsi variansi dalam variabel terikat (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (lebih dari satu variabel) secara bersama-sama. Persamaan regresi linier berganda semakin baik apabila nilai koefisien determinasi (R^2) semakin besar mendekati (1) dan cenderung meningkat nilainya sejalan dengan peningkatan jumlah variabel bebas (Sanusi, 2011). Rumus untuk Koefisien determinasi adalah

$$R^2 = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

R^2 : Koefisien Determinasi

r^2 : Koefisien korelasi

Jika R^2 mendekati nol, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah. Jika R^2 mendekati satu (1), maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

2. Uji F (Pengujian secara Simultan)

Berdasarkan Sugiyono (2017:192) uji F atau sering diartikan sebagai uji serempak bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat secara signifikan. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Penggunaan tingkat signifikansi seperti yang kita ketahui bergantung keinginan penelitian.

H_0 ditolak jika F hitung $> F$ tabel atau $\text{sig} < \alpha$,

H_0 diterima jika F hitung $< F$ tabel atau $\text{sig} > \alpha$. Rumus uji F adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan:

R^2 : Koefisien determinasi

k : Jumlah variabel independen

n : Jumlah anggota data atau kasus

F hasil perhitungan ini dibandingkan dengan F tabel yang diperoleh dengan menggunakan tingkat resiko atau signifikan level 5 %.

3. Uji t (Uji Parsial)

Berdasarkan regresi linear berganda juga terdapat uji t atau sering diartikan sebagai uji parsial bertujuan untuk menguji secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel *coefficiencie* pada kolom sig (*signifivicance*). Jika probabilitas nilai t atau signifikansi $< 0,05$ dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Namun, jika probabilitas nilai t atau signifikansi $> 0,05$ dapat dikatakan

bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Tahapan dalam uji t adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis penelitian

Ho : Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat

Ha : Secara parsial ada pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat

b. Setelah itu menentukan signifikansi yang akan digunakan 5% (ukuran ini adalah yang paling sering digunakan dalam penelitian)

c. Selanjutnya adalah menentukan t hitung yang dapat dilihat dari hasil analisis regresi linear berganda. Setelah t hitung adalah mencari t tabel dengan menggunakan tingkat signifikansi 95%. Lalu dibandingkan antara t hitung dengan t tabel. Hipotesis (Ha) diterima bila nilai t hitung > t tabel, sebaliknya (Ho) ditolak bila nilai t hitung < t tabel. Berdasarkan Sugiyono (2017:194) rumus uji t adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = Distribusi t

r = Koefisien korelasi parsial

r² = Koefisien determinasi

n = Jumlah data

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Wilayah Kerja

Pacitan merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.389,8716 Km² atau 138.987,16 Ha. Luas tersebut sebagian besar berupa perbukitan yaitu kurang lebih 85 %, gunung-gunung kecil lebih kurang 300 buah menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan yang termasuk dalam deretan Pegunungan Seribu yang membujur sepanjang selatan Pulau Jawa dan jurang terjal, sedang selebihnya merupakan dataran rendah. Kabupaten Pacitan terletak di Pantai Selatan Pulau Jawa dan merupakan pintu gerbang bagian barat dari Jawa Timur dengan kondisi fisik pegunungan kapur selatan yang membujur dari Gunung kidul ke Kabupaten Trenggalek menghadap ke Samudera Indonesia. Adapun wilayah administrasi terdiri dari 12 Kecamatan (Pacitan, Arjosari, Nawangan, Bandar, Kebonagung, Tegalombo, Tulakan, Ngadirojo, Sudimoro, Pringkuku, Punung, Donorojo), 5 Kelurahan dan 166 Desa dengan batas-batas administrasi:

- a. Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek (Jawa Timur);
- b. Sebelah Selatan : Samudra indonesia;
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)

3. **Via Surakarta (Bandara Adisumarmo)**, selanjutnya dengan kendaraan darat sejauh \pm 110 km, melalui Sukoharjo – Wonogiri – Baturetno – Giriwoyo – Donorojo – Punung – Pacitan dengan waktu tempuh \pm 3 jam. Transportasi yang tersedia : Bus dan Travel.

Jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan sesuai hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 tercatat sebesar 540.881 jiwa, terdiri dari laki-laki 264.112 jiwa dan perempuan 276.769 jiwa, dengan distribusi penduduk terbesar berada di Kecamatan Tulakan yaitu sebesar 14,30%, yang diikuti oleh Kecamatan Pacitan sebesar 13,5%. Distribusi terkecil adalah Kecamatan Pringkuku sebesar 5,49% dan Sudimoro sebesar 5,55%. Komoditas perkebunan unggulan yang dikembangkan di kabupaten ini antara lain kelapa, cengkeh, kakao dan kopi. Potensi kelautan yaitu Tuna, Layur, Lobster, Cakalang, Tengiri, Dorang, Rumput Laut, untuk hasil hutan kayu jati, kayu sengon laut, kayu akasia, kayu mahoni, kayu pinus, kayu sono, bamboo dan gelina.

Sektor pariwisata di Pacitan diantaranya Monumen Jenderal Sudirman, Pacitan yang dikenal dengan kota 1001 goa memiliki potensi goa yang bisa dikembangkan untuk pariwisata diantaranya Goa Gong, Goa Tabuhan sedangkan dari wisata pantai yaitu pantai Teleng Ria, Klayar. Di sektor pertambangan, Pacitan mempunyai areal 33 jenis bahan tambang mulai dari Emas, marmar, bentonit, hingga pasir kuarsa. Kerajinan batu akik yang terpusat di kawasan Donorojo, Kerajinan Batik tulis has Pacitan dengan pewarna alami. Dengan dibangunnya sarana dan prasarana di kabupaten Pacitan, diantaranya Pembangunan PLTU di Kecamatan Sudimoro, Pembangunan Jalan Lingkar

Selatan yang menghubungkan Pacitan Malang, Pembangunan perluasan pelabuhan kapal ikan, Pembangunan pelabuhan bongkar muat barang, seiring dengan dibangunnya sarana dan prasarana tersebut, perekonomian pacitan tumbuh dan akan menjadi potensi penerimaan pajak yang lebih menjanjikan sehingga perlu adanya pengawasan yang lebih.

2. Kedudukan KP2KP terhadap Instansi Vertikal

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP 158/PJ./2007 tanggal 5 Nopember 2007, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pacitan mulai beroperasi dengan menempati Gedung eks Pos Pacitan yang berlokasi di Jl Cut Mutia Nomor 4 Pacitan Jawa Timur dengan luas Tanah 946 m² untuk bangunan luas kantor 290 m² luas Pos Jaga dan Mushola 32 m² luas garasi 40 m², luas rumah dinas 50 m².

Tabel 16. Kedudukan KP2KP terhadap Instansi Vertikal

Sebelum Modernisasi	Setelah Modernisasi
Departemen Keuangan RI ↓ Direktorat Jenderal Pajak ↓ Kanwil DJP Jabagtim II ↓ Kantor Pelayanan Pajak Madiun ↓ Kantor Penyuluhan Dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) Ponorogo ↓ Pos Pacitan	Kementerian Keuangan RI ↓ Direktorat Jenderal Pajak ↓ Kanwil Djp Jatim II ↓ Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo ↓ Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pacitan

Sumber: pacitankab.go.id



3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Direktorat Jenderal Pajak. KP2KP mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat serta membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. KP2KP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Tugas Dan Fungsi KP2KP :

- a. pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, dan pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat;
- b. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- c. bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak;
- d. pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan dalam rangka membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
- e. pelaksanaan administrasi kantor.

4. Visi dan Misi

Visi:

Menjadi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Dipercaya Masyarakat dengan Integritas dan Profesionalisme.

Misi:

Menghimpun Penerimaan Pajak Negara dengan Meningkatkan Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat terhadap Pajak Melalui Optimalisasi Pelayanan.

5. Motto Pelayanan dan Janji Pelayanan

Motto Pelayanan:

“CERMAT”

Cepat: memberikan pelayanan tepat waktu dan tidak menunda-nunda

Efisien: pelayanan yang diberikan hemat waktu dan tenaga Wajib Pajak

Ramah: sopan dan santun dalam memberikan pelayanan

Mudah: pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau dipersulit

Aktif: bersikap aktif dalam membantu, melayani dan mendengarkan keluhan

Wajib Pajak sesuai ketentuan

Tidak dipungut biaya: segala pelayanan dan formulir yang disediakan gratis/tidak dipungut biaya.

Janji Pelayanan:

Tidak Dipungut Biaya, Persyaratan Jelas, Tepat Waktu

6. Kendala/Tantangan dan Inovasi

Saat menjalankan tugas melayani masyarakat/wajib pajak dengan tingkat pemahaman perpajakan yang berbeda, adanya penyebaran penduduk, kondisi geografis berupa pegunungan, jurang yang curam, jalan yang berkelok dan sempit dengan jumlah pegawai organik 3 orang tentunya menjadi Kendala dan tantangan tersendiri. Jarak yang terjauh dari KP2KP Pacitan adalah kecamatan Sudimoro dengan waktu tempuh \pm 2 Jam, sedangkan medan yang tersulit menuju Kecamatan Bandar dan Nawangan karena jalan berkelok, sempit, tanjakan turunan yang curam dan jurang. Untuk kegiatan sosialisai yang dikerjakan dikantor terkendala masalah tempat atau ruangan karena jadi satu dengan Tempat

Pelayanan Terpadu (TPT) yang berukuran \pm 6 meter X 18 meter, sehingga harus diatur waktu dengan jumlah peserta sosialisasi terbatas.

Upaya dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat tentang peraturan perpajakan dilakukan berbagai inovasi, diantaranya adalah penyuluhan/konsultasi dilaksanakan secara langsung (di kantor, pendopo, gedung DPRD dan instansi lain). Maupun melalui media baik cetak (advertorial/iklan di koran) maupun elektronik seperti radio (spot iklan dan dialog interaktif) dan televisi (berita dan kabar apik JTV), serta kegiatan lain seperti pekan panutan, pemasangan spanduk dan baliho, tax campaign, high school tax road show, pojok pajak, expo, mobil pajak keliling, drop box. Aksi simpatik pajak melalui pembagian brosur, souvenir, stiker & bunga, hiburan rakyat, games untuk anak-anak dan masyarakat, senam bersama, pemilihan duta pajak dan sosialisasi untuk anak-anak SD dan TK melalui media dongeng yang disampaikan oleh tokoh pendongeng nasional.

Tax Goes to School Drum Band Festival tingkat SLTP/MTs se-Kabupaten Pacitan. Melaksanakan sosialisasi dan kelas SPT di Kecamatan-kecamatan. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Masa diantaranya dengan memberikan kupon undian *Door prize* bagi yang melaporkan SPT Masa tepat waktu dari tanggal 1 s/d 10 setiap bulannya dengan harapan bisa mengingatkan WP untuk lapor, pajak terutang bisa disetor lebih awal, melaporkan SPT masa lebih awal.

7. Fasilitas Kantor

Berkaitan dengan upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak dengan memberikan rasa aman, nyaman, KP2KP Pacitan didukung dengan Fasilitas kantor, diantaranya sebagai berikut :

- a. Ruang Pelayanan dan berfungsi sebagai ruang sosialisasi
- b. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), untuk pelayanan 2 loket untuk konsultasi 1 loket
- c. Mesin Antrian
- d. Loket Pos Persepsi
- e. AC (Pendingin Ruangan).
- f. TV sonny 32 inc
- g. Mushola dengan Pendingin.
- h. 2 Toilet.
- i. LCD Projector
- j. Dll

8. Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) di KP2KP Pacitan Terdiri dari :

- a. Tenaga Organik 3 Orang (Kepala KP2KP, Pelaksana pendidikan D1 Prodip, Bendahara pendidikan SMA)
- b. Tenaga non Organik
 1. 4 orang satpam, bertugas 2 orang setiap sifnya menjaga keamanan dan pelayanan di pintu masuk Tempat Pelayanan Terpadu dan di pos satpam
 2. 1 orang CS

- c. Dua Honorer pendidikan SMK yang bertugas membantu di tempat pelayanan terpadu.

B. Deskripsi Responden

Deskripsi responden dalam penelitian ini dapat dilihat melalui jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan jenis profesi. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan 100 kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pacitan. Sebanyak 99 kuesioner kembali dan 96 kuesioner yang dapat diolah, sebab ada 1 kuesioner yang dibawa oleh responden dan tidak kembali, sedangkan 3 kuesioner yang tidak dapat diolah karena belum sampai selesai responden mengisi kuesioner tersebut, responden sudah dipanggil pihak pelayanan dan setelah selesai mereka langsung meninggalkan KP2KP.

Tabel 17. Hasil Penyebaran Kuesioner

Kuesioner yang disebar	100
Koesioner yang kembali	99
Tingkat pengembalian kuesioner	99%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	3
Kuesioner yang diolah	96
Persentase kuesioner yang diolah	96%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

1. Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Pengidentifikasi responden kuesioner berdasarkan jenis kelamin dijelaskan pada **Tabel 19**. Berdasarkan pengelompokan jenis kelamin dapat diketahui bahwa responden perempuan mendominasi yaitu sebesar 60,42%.

Tabel 18. Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	38	39,58%
Perempuan	58	60,42%
Total	96	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

2. Identifikasi Responden Berdasarkan Usia

Pengidentifikasi responden berdasarkan usia dapat dijelaskan pada **Tabel 20**. Berdasarkan pengelompokan usia, responden yang mendominasi adalah usia 41-50 tahun sebesar 34,38%. Usia 41-50 tahun merupakan usia angkatan kerja yang masih produktif. Bonus demografi yang terjadi di Indonesia sudah mulai dapat dirasakan, dimana angka penduduk usia produktif sangat mendominasi, meskipun puncak dari bonus demografi ini masih diperkirakan terjadi pada 2020-2030 yang menunjukkan angka usia produktif di Indonesia dapat mencapai 70% dari total jumlah penduduk Indonesia.

Tabel 19. Identifikasi Responden Berdasarkan Usia

Usia (tahun)	Jumlah	Persentase
≤20	13	13,54%
21-30	21	21,87%
31-40	23	23,96%
41-50	33	34,38%
≥51	6	6,25%
Total	96	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

3. Identifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pengidentifikasi responden berdasarkan tingkat pendidikan diketahui bahwa sebanyak 53,12% Wajib Pajak merupakan lulusan SMA/Sederajat. Hal ini karena kebanyakan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) lebih memilih untuk bekerja setelah lulus SMA dari

pada meneruskan ke jenjang pendidikan tinggi karena kondisi ekonomi yang masih rendah/kurang. Kabupaten Pacitan hanya memiliki sedikit perguruan tinggi bahkan hanya ada Universitas Terbuka dan juga Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan, sehingga masyarakat tidak memiliki banyak pilihan untuk dapat melanjutkan pendidikannya serta jauhnya akses Pacitan ke luar kota menjadikan sebagian besar masyarakat memilih untuk enggan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Pengidentifikasi tingkat pendidikan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 20. Identifikasi responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SMP/ Sederajat	2	2,08%
SMA/ Sederajat	51	53,12%
DIII	4	4,17%
SI	37	38,55%
S2	2	2,08%
Total	96	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

4. Identifikasi Responden Berdasarkan Profesi

Pengidentifikasi responden berdasarkan profesi yang dijalani dapat diketahui bahwa sebesar 45,83% responden berprofesi sebagai karyawan/pegawai.

Pengidentifikasi responden berdasarkan profesi adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Pengidentifikasi Responden Berdasarkan Profesi

Profesi	Jumlah	Persentase
Karyawan/Pegawai	44	45,83%
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	17	17,71%
Guru	12	12,5%
Wiraswasta	20	20,83%
Bidan & Perawat	3	3,13%
Total	96	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

C. Statistik Deskriptif

1. Mean, Median, Modus, Deviasi Standard dan Varian

Mean merupakan pengukuran nilai sentral suatu distribusi data berdasarkan nilai rata-rata yang dihitung dengan cara membagi nilai hasil penjumlahan sekelompok data dengan jumlah data yang diteliti. Median merupakan nilai data yang terletak ditengah-tengah dari suatu distribusi data penelitian yang disusun secara berurutan sedangkan modus merupakan data yang memiliki frekuensi paling banyak dalam suatu distribusi data. Dispersi mengukur variasi data yang diteliti dari angka rata-ratanya. Perbedaan antara nilai data yang diteliti dengan nilai rata-ratanya disebut dengan deviasi. Berikut ini hasil dari perhitungan statistik deskriptif:

Tabel 22. Statistik Deskriptif Keadilan Umum

	x1.1	x1.2	x1.3	TotalX1
N Valid	96	96	96	96
Missing	0	0	0	0
Mean	3.61	3.44	3.60	10.66
Median	4.00	4.00	4.00	11.00
Mode	4	4	4	12
Std. Deviation	.944	.892	.688	1.989
Variance	.892	.796	.473	3.954

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Nilai standar deviasi variabel keadilan umum, untuk pernyataan X1.1, X1.2 dan X1.3 adalah 0,944, 0,892 dan 0,688. *Variance* untuk X1.1, X1.2 dan X1.3 adalah 0,892, 0,796 dan 0,473, sedangkan median dan modus memiliki nilai yang sama untuk ketiga pernyataan nilainya adalah 4. Mean untuk X1.1, X1.2 dan X1.3 adalah 3,61, 3,44, 3,60. Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada variabel

keadilan umum dapat dikatakan bahwa sistem perpajakan di Indonesia dan pembebanan pajak menurut responden sudah adil.

Tabel 23. Statistik Deskriptif Kepentingan Pribadi

	x2.1	x2.2	x2.3	TotalX2
N Valid	96	96	96	96
Missing	0	0	0	0
Mean	2.76	3.00	2.72	8.48
Median	3.00	3.00	3.00	9.00
Mode	3	3	3	9
Std. Deviation	.867	.781	.660	1.472
Variance	.753	.611	.436	2.168

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Nilai standar deviasi variabel kepentingan pribadi, untuk pernyataan X2.1, X2.2 dan X2.3 adalah 0,867, 0,781 dan 0,660. *Variance* untuk X2.1, X2.2 dan X2.3 adalah 0,753, 0,611 dan 0,436, sedangkan median dan modus memiliki nilai yang sama untuk ketiga pernyataan nilainya adalah 3. Mean untuk X2.1, X2.2 dan X2.3 adalah 2,76, 3,00, 3,72. Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada variabel kepentingan pribadi dapat dikatakan bahwa keuntungan pribadi yang didapatkan dari pembayaran pajak menurut responden cukup adil.

Tabel 24. Statistik Deskriptif Struktur Tarif Pajak

	x3.1	x3.2	x3.3	x3.4	totalx3
N Valid	96	96	96	96	96
Mean	4.09	3.61	3.43	3.10	14.24
Median	4.00	4.00	4.00	3.00	14.00
Mode	4	4	4	3	14
Std. Deviation	.741	.863	1.122	.864	1.879
Variance	.549	.745	1.258	.747	3.531

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Nilai standar deviasi variabel keadilan umum, untuk pernyataan X3.1, X3.2, X3.3 dan X3.4 adalah 0,741, 0,863, 1,122 dan 0,864. *Variance* untuk X3.1, X3.2, X3.3 dan X3.4 adalah 0,549, 0,745, 1,258 dan 0,747, sedangkan median dan modus memiliki nilai yang sama untuk ketiga pernyataan nilainya adalah 4 dan 1 pernyataan nilainya 3. Mean untuk X3.1, X3.2, X3.3 dan X3.4 adalah 4,09, 3,61, 3,43 dan 3,10. Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada variabel struktur tarif pajak dapat dikatakan bahwa struktur tarif pajak yang berlaku menurut responden sudah adil.

Tabel 25. Statistik Deskriptif Ketentuan yang Diberlakukan Khusus

	x4.1	x4.2	x4.3	x4.4	totalx4
N Valid	96	96	96	96	96
Missing	0	0	0	0	0
Mean	3.07	3.32	3.42	2.99	12.80
Median	3.00	3.50	3.00	3.00	13.00
Mode	3	4	3	2	12
Std. Deviation	.897	.989	1.012	.968	2.553
Variance	.805	.979	1.025	.937	6.518

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Nilai standar deviasi variabel ketentuan-ketentuan yang diberlakukan khusus, untuk pernyataan X4.1, X4.2, X4.3 dan X4.4 adalah 0,897, 0,989, 1,012 dan 0,968. *Variance* untuk X4.1, X4.2, X4.3 dan X4.4 adalah 0,805, 0,979, 1,025 dan 0,937, sedangkan median bernilai 3,00, 3,50, 3,00 dan 3,00. Mean untuk X4.1, X4.2, X4.3 dan X4.4 adalah 3,07, 3,32, 3,42 dan 2,99. Modus atau jawaban yang sering muncul adalah 3, 4, 3, 2. Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada variabel keadilan umum dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus menurut responden cukup adil.

Tabel 26. Statistik Deskriptif Timbal Balik dengan Pemerintah

	x5.1	x5.2	x5.3	totalx5
N Valid	96	96	96	96
Missing	0	0	0	0
Mean	3.45	2.97	3.44	9.85
Median	4.00	3.00	4.00	10.00
Mode	4	2	4	10
Std. Deviation	.939	.989	.792	1.563
Variance	.881	.978	.628	2.442

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Nilai standar deviasi variabel timbal balik dengan pemerintah, untuk pernyataan X5.1, X5.2 dan X5.3 adalah 0,939, 0,989 dan 0,792. *Variance* untuk X5.1, X5.2 dan X5.3 adalah 0,881, 0,978 dan 0,792, sedangkan median nilainya adalah 4,00, 3,00 dan 4,00. Mean untuk X5.1, X5.2 dan X5.3 adalah 3,45, 2,97 dan 3,44. Modusnya bernilai 4, 2, 4 Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada variabel kepentingan pribadi dapat dikatakan bahwa timbal balik yang diberikan pemerintah menurut responden cukup adil.

Tabel 27. Statistik Deskriptif Motivasi

	y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y8	y9	totaly
N Valid	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean	4.00	4.15	4.39	3.40	3.73	4.23	4.19	3.52	3.97	35.56
Median	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	36.00
Mode	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Std. Deviation	.711	.665	.622	.900	.852	.624	.604	.725	.876	3.365
Variance	.505	.442	.387	.810	.726	.389	.364	.526	.767	11.322

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Nilai standar deviasi variabel motivasi membayar pajak, untuk pernyataan Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8 dan Y9 adalah 0,711, 0,665, 0,622, 0,900, 0,852, 0,624, 0,604, 0,725 dan 0,876. *Variance* untuk Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8 dan Y9 adalah 0,505, 0,442, 0,387, 0,810, 0,726, 0,389, 0,364, 0,526 dan 0,767, sedangkan median dan modus bernilai 4. Mean untuk Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8 dan Y9 adalah 4,00, 4,15, 4,39, 3,40, 3,73, 4,23, 4,19, 3,52 dan 3,97. Berdasarkan hasil statistik deskriptif dapat dikatakan motivasi membayar pajak menurut responden cukup adil.

Tabel 28. Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Keadilan Umum

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
X1.1	4	4.2%	13	13.5%	5	5.2%	68	70.8%	6	6.2%	3.61
X1.2	5	5.2%	9	9.4%	23	24.0%	57	59.4%	2	2.1%	3.44
X1.3	0	0%	8	8.3%	25	26.0%	60	62.5%	3	3.1%	3.60
Grand Mean											3.55

Sumber: Data Diolah, 2018

Keterangan :

f : frekuensi

X1.1 : Wajib Pajak Setuju, sistem perpajakan di Indonesia sudah diatur secara adil

X1.2 : Wajib Pajak Setuju, secara umum cara pembebanan pajak didistribusikan secara adil

X1.3 : Wajib Pajak Setuju, pajak yang dibebankan pada mereka sudah secara adil

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pernyataan X1.2 memiliki nilai rata-rata yang paling rendah diantara yang lainnya. Nilai mean X1.2 adalah sebesar 3.44, sedangkan pernyataan yang lainnya X1.1 nilai mean sebesar 3.61 dan X1.3 sebesar 3.60. Hal ini berarti bahwa rata-rata Wajib Pajak berpendapat bahwa cara pembebanan pajak didistribusikan secara belum adil, sedangkan yang terbesar Wajib Pajak berpendapat bahwa mereka setuju sistem perpajakan di

Indonesia sudah diatur secara adil. Hal ini disebabkan karena belum meratanya pembebanan pajak terlebih lagi pada Wajib Pajak yang berada di daerah desa yang jauh dari perkotaan. Rata-rata Wajib Pajak di Pacitan belum memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban perpajakan mereka, sehingga kepatuhan pajak itu pun masih perlu ditingkatkan.

Tabel 29. Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Kepentingan Pribadi

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
X2.1	6	6.2%	31	32.3%	40	41.7%	18	18.8%	1	1.0%	2.76
X2.2	3	3.1%	19	19.8%	50	52.1%	23	24.0%	1	1.0%	3.00
X2.3	2	2.1%	32	33.3%	53	55.2%	9	9.4%	0	0%	2.72
Grand Mean											2.83

Sumber: Data Diolah, 2018

Keterangan :

f : frekuensi

X2.1 : Wajib Pajak Setuju, hukum pajak mengharuskan untuk membayar lebih besar dibandingkan pembagian pajaknya

X2.2 : Wajib Pajak Setuju, dibandingkan Wajib Pajak lain, pajak yang mereka bayarkan lebih kecil

X2.3 : Wajib Pajak Setuju, dibandingkan dengan Wajib Pajak lain pajak yang dia bayarkan lebih besar

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pernyataan X2.3 memiliki nilai rata-rata yang paling rendah diantara yang lainnya. Nilai mean X2.3 adalah sebesar 2.72, sedangkan pernyataan yang lainnya X2.1 nilai mean sebesar 2.76 dan X2.2 sebesar 3.00. Hal ini berarti bahwa rata-rata Wajib Pajak berpendapat bahwa dibandingkan dengan Wajib Pajak yang lain pajak yang dia bayarkan lebih kecil. Hal ini dikarenakan rata-rata Wajib Pajak yang ke KP2KP pada saat penelitian ini dilakukan adalah Wajib Pajak baru yang mereka rata-rata berprofesi sebagai pegawai/karyawan.

Tabel 30. Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Struktur Tarif Pajak

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
X3.1	1	1.0%	2	2.1%	10	10.4%	57	59.4%	26	27.1%	4.09
X3.2	2	2.1%	9	9.4%	22	22.9%	54	56.2%	9	9.4%	3.61
X3.3	6	6.2%	29	19.8%	10	10.4%	50	52.1%	11	11.5%	3.43
X3.4	5	5.2%	15	15.6%	42	43.8%	33	34.4%	1	1.0%	3.10
Grand Mean											3.56

Sumber: Data Diolah, 2018

Keterangan :

f : frekuensi

X3.1 : Wajib Pajak Setuju, penerima penghasilan tinggi membayar pajak lebih besar

X3.2 : Wajib Pajak Setuju, tarif pajak proporsional adil

X3.3 : Wajib Pajak Tidak Setuju, tarif pajak yang adil adalah harus sama untuk setiap Wajib Pajak

X3.4 : Wajib Pajak Setuju, pengenaan tarif tetap adalah adil

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pernyataan X3.4 memiliki nilai rata-rata yang paling rendah diantara yang lainnya. Nilai mean X3.4 adalah sebesar 3.10, sedangkan pernyataan yang lainnya X3.1 nilai mean sebesar 4.09, X3.2 sebesar 3.61 serta X3.3 nilainya sebesar 3.43. Hal ini berarti bahwa rata-rata Wajib Pajak berpendapat bahwa pengenaan tarif tetap adalah tidak adil. Wajib Pajak setuju bahwa penerima penghasilan tinggi harus membayar pajak yang lebih besar. Hal ini dikarenakan tarif tetap memberatkan Wajib Pajak sebab tidak selalu usaha Wajib Pajak itu mengalami keuntungan atau akan terus berproduksi di masa datang, sehingga apabila tetap misal dipungut pajak maka itu tidak adil bagi mereka.

Tabel 31. Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Ketentuan-Ketentuan yang Diberlakukan Khusus

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
X4.1	3	3.1%	20	20.8%	46	47.9%	21	21.9%	6	6.2%	3.07
X4.2	3	3.1%	19	19.8%	26	27.1%	40	41.7%	8	8.3%	3.32
X4.3	3	3.1%	14	14.6%	33	34.4%	32	33.3%	14	14.6%	3.42
X4.4	2	2.1%	35	36.5%	25	26.0%	30	31.2%	4	4.2%	2.99
Grand Mean											3.20

Sumber: Data Diolah, 2018

Keterangan :

f : frekuensi

X4.1 : Wajib Pajak Setuju, ketentuan-ketentuan khusus untuk Wajib Pajak tertentu tidak adil

X4.2 : Wajib Pajak Setuju, pengurangan pajak untuk Wajib Pajak tertentu itu tidak adil

X4.3 : Wajib Pajak Setuju, kebijakan pengampunan pajak untuk yang belum melaporkan hartanya itu tidak adil

X4.4 : Wajib Pajak Setuju, Wajib Pajak yang memiliki penghasilan sama harus dikenakan pajak yang sama adalah tidak adil

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pernyataan X4.4 memiliki nilai rata-rata yang paling rendah diantara yang lainnya. Nilai mean X4.4 adalah sebesar 2.99, sedangkan pernyataan yang lainnya X4.1 nilai mean sebesar 3.07, X4.2 sebesar 3.32 dan X4.3 sebesar 3.42. Hal ini berarti bahwa rata-rata Wajib Pajak berpendapat bahwa Wajib Pajak yang memiliki penghasilan sama harus dikenakan pajak yang sama adalah adil. Hal ini menunjukkan bahwa kurang pemahannya Wajib Pajak terkait dengan mekanisme pengenaan Pajak Penghasilan yang dalam perhitungannya juga mempertimbangkan dari segi tanggungan dari Wajib Pajak tersebut dan juga terkait pengurang penghasilan (Penghasilan Tidak Kena Pajak), sehingga dari sini dibutuhkan sosialisasi lebih dari fiscus untuk mencerdaskan masyarakat mengenai pajak.

Tabel 32. Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Timbal Balik dengan Pemerintah

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean
	F	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
X5.1	3	3.1%	17	17.7%	14	14.6%	58	60.4%	4	4.2%	3.45
X5.2	2	2.1%	36	37.5%	27	28.1%	25	26.0%	6	6.2%	2.97
X5.3	0	0%	16	16.7%	24	25.0%	54	56.2%	2	2.1%	3.44
Grand Mean											3.29

Sumber: Data Diolah, 2018

Keterangan:

f : frekuensi

X5.1 : Wajib Pajak Setuju, nilai manfaat yang diterima sesuai dan adil dengan pajak yang dibayarkan

X5.2 : Wajib Pajak Setuju, pajak penghasilan yang dibayarkan terlalu tinggi dibandingkan manfaat yang diterima

X5.3 : Wajib Pajak Setuju, manfaat yang diterima atas pembayaran pajak penghasilan telah sesuai/adil

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pernyataan X5.2 memiliki nilai rata-rata yang paling rendah diantara yang lainnya. Nilai mean X5.2 adalah sebesar 2.97, sedangkan pernyataan yang lainnya X5.1 nilai mean sebesar 3.45 dan X5.3 sebesar 3.44. Hal ini berarti bahwa rata-rata Wajib Pajak berpendapat bahwa pajak penghasilan yang dibayarkan dengan manfaat yang diterima telah sesuai dan adil. Hal ini dapat dilihat dari perbaikan fasilitas publik misalnya pembangunan taman-taman kota. Proses timbulnya motivasi seseorang sebagaimana dijelaskan dalam Ardana, Mujiati dan Sriathi (2013), kepuasan seseorang terhadap suatu hal dapat mendorongnya untuk melakukan suatu hal. Asas *equity* (keadilan) dalam pemungutan pajak menurut Adam Smith, adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diterimanya.

Tabel 33. Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Motivasi Membayar Pajak

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean
	F	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
Y1	1	1.0%	4	4.2%	6	6.2%	68	70.8%	17	17.7%	4.00
Y2	1	1.0%	2	2.1%	3	3.1%	66	68.8%	24	25.0%	4.15
Y3	0	0%	1	1.0%	4	4.2%	48	50.0%	43	44.8%	4.39
Y4	4	4.2%	12	12.5%	25	26.0%	52	54.2%	3	3.1%	3.40
Y5	3	3.1%	4	4.2%	21	21.9%	56	58.3%	12	12.5%	3.73
Y6	1	1.0%	0	0%	4	4.2%	62	64.6%	29	30.2%	4.23
Y7	0	0%	0	0%	10	10.4%	58	60.4%	28	29.2%	4.19
Y8	1	1.0%	6	6.2%	35	36.5%	50	52.1%	4	4.2%	3.52
Y9	0	0%	8	8.3%	14	14.6%	47	49.0%	27	28.1%	3.97
Grand Mean											3.95

Sumber: Data Diolah, 2018

Keterangan:

f : frekuensi

Y1 : Wajib Pajak Setuju, mereka melaksanakan kewajiban perpajakan timbul dengan sukarela dan dari kesadaran sendiri

Y2 : Wajib Pajak Setuju, membayar pajak merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada negara

Y3 : Wajib Pajak Setuju, rakyat akan taat pajak jika keuangan negara dikelola dengan tertib, efisien, transparan

Y4 : Wajib Pajak Setuju, pembebanan pajak telah didistribusikan dengan merata dan sistem perpajakannya adil

Y5 : Wajib Pajak Setuju, membayar pajak bagi Wajib Pajak berpenghasilan diatas PTKP merupakan suatu kewajiban

Y6 : Wajib Pajak Setuju, manfaat pembayaran pajak adalah penyediaan sarana pendidikan dan layanan kesehatan gratis yang disediakan pemerintah

Y7 : Wajib Pajak Setuju, proporsi tariff pajak dan lapisan PTKP harus menganut asas keadilan bagi masyarakat

Y8 : Wajib Pajak Setuju, pembayaran pajak penghasilan sebaiknya dilakukan sebelum jatuh tempo karena jika lewat akan didenda 2%

Y9 : Wajib Pajak Tidak Setuju, pemberian informasi tentang pentingnya pajak tidak diperlukan karena banyak diantara masyarakat yang sudah memahaminya

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pernyataan Y.4 memiliki nilai rata-rata yang paling rendah diantara yang lainnya. Nilai mean Y.4 adalah sebesar 3.40, sedangkan pernyataan yang lainnya tertinggi nilai mean Y3 sebesar 4.39. Hal

ini berarti bahwa rata-rata Wajib Pajak berpendapat bahwa pembebanan pajak belum didistribusikan dengan merata dan sistem perpajakannya belum adil. Hal ini dikarenakan faktor lokasi rumah Wajib Pajak yang sulit untuk dijangkau, kurangnya pengetahuan pajak dan belum terjangkaunya beberapa orang yang seharusnya layak menjadi wajib Pajak akhirnya memengaruhi motivasi Wajib Pajak untuk membayar pajak.

D. Uji Hipotesis

1. Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menjelaskan proporsi variansi dalam variabel terikat (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (lebih dari satu variabel) secara bersama-sama. Persamaan regresi linier berganda semakin baik apabila nilai koefisien determinasi (R^2) semakin besar mendekati (1) dan cenderung meningkat nilainya sejalan dengan peningkatan jumlah variabel bebas. Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi (R^2):

Tabel 34. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.438 ^a	.192	.147	3.108	.192	4.270	5	90	.002

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan hasil pengujian *R Square* sebesar 0.192, hal ini berarti bahwa variabel X1, X2, X3, X4 dan X5 secara simultan (bersama) berpengaruh terhadap variabel Y adalah sebesar 19,2%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhartini (2015) dengan judul Pengaruh Keadilan Sistem

Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Motivasi sebagai Variabel Intervening. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa keadilan sistem pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dan motivasi, selain itu motivasi juga berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Nilai dari R^2 semakin besar mendekati 1 berarti pengaruhnya lebih kuat dan apabila dilihat dari uji diatas maka nilai R^2 adalah 0.192. Nilai ini lebih mendekati 0 itu berarti bisa disimpulkan bahwa pengaruh keadilan pajak terhadap motivasi membayar pajak itu kecil. Hal ini sesuai dengan pendapat Ivancevich, Konopaske dan Matteson (2006:159) menyatakan bahwa teori keadilan menjelaskan bagaimana persepsi seseorang mengenai seberapa adil mereka diperlakukan dalam transaksi sosial dapat memengaruhi motivasi mereka. Pembahasan mengenai keadilan pajak sangat bergantung pada persepsi Wajib Pajak itu sendiri sehingga hasilnya pun tidak lah pasti/ tetap.

2. Uji Simultan (F)

Uji F atau sering diartikan sebagai uji serempak bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat secara signifikan. Dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikan $< 0,05$, atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jika nilai signifikan $> 0,05$, atau $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. F_{tabel} pada uji ini adalah sebesar $F_{tabel} = F(k;n-k) = F(5;96-5) = F(5;91)$ lihat di F tabel, sehingga nilai yang didapat $F_{tabel} = 2,31$. Berikut ini hasil uji simultan (F):

Tabel 35. Uji Simultan (F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	206.251	5	41.250	4.270	.002 ^a
	Residual	869.374	90	9.660		
	Total	1075.625	95			

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji simultan (F) diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1, X2, X3, X4 dan X5 secara simultan terhadap Y adalah $0,002 < 0,05$ dan nilai F hitung $4,270 > F$ tabel 2,31, sehingga dapat disimpulkan bahwa H6 (Hipotesis 6) diterima yang berarti terdapat pengaruh X1, X2, X3, X4 dan X5 secara simultan terhadap Y. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhartini (2015) dengan judul Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Motivasi sebagai Variabel Intervening. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa keadilan sistem pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dan motivasi, selain itu motivasi juga berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

3. Uji Parsial (t)

Uji t atau sering diartikan sebagai uji parsial bertujuan untuk menguji secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel *coefficience* pada kolom sig (*signifivance*). Jika probabilitas nilai t atau signifikansi $< 0,05$ atau t hitung $> t$ tabel maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Namun, jika probabilitas nilai t atau signifikansi $> 0,05$ atau t hitung $< t$ tabel maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing

variabel bebas terhadap variabel terikat. t tabel dalam penelitian ini adalah sebesar $t_{tabel} = t(\alpha/2; n-k-1) = t(0,025; 96-5-1) = t(0,025; 90)$ dilihat dari tabel $t = 1,98667$.

Berikut ini hasil Uji Parsial (t):

Tabel 36. Uji Parsial (t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20.145	3.751		5.371	.000
x1	.067	.185	.040	.363	.718
x2	.024	.239	.011	.101	.920
x3	.253	.178	.141	1.423	.158
x4	.433	.148	.329	2.923	.004
x5	.543	.228	.252	2.376	.020

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan uji t pada tabel 37 diketahui bahwa:

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,718 $> 0,05$ dan nilai t hitung 0,363 $< t$ tabel 1,98667, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh keadilan umum terhadap motivasi membayar pajak.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,920 $> 0,05$ dan nilai t hitung 0,101 $< t$ tabel 1,98667, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh kepentingan pribadi terhadap motivasi membayar pajak.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar 0,158 > 0,05 dan nilai t hitung 1,423 < t tabel 1,98667, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh struktur tarif pajak terhadap motivasi membayar pajak.

4. Pengujian Hipotesis Keempat

Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X4 terhadap Y adalah sebesar 0,004 < 0,05 dan nilai t hitung 2,923 > t tabel 1,98667, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima yang berarti terdapat pengaruh ketentuan-ketentuan yang diberlakukan khusus terhadap motivasi membayar pajak.

5. Pengujian Hipotesis Kelima

Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X5 terhadap Y adalah sebesar 0,020 < 0,05 dan nilai t hitung 2,376 > t tabel 1,98667, sehingga dapat disimpulkan bahwa H5 diterima yang berarti terdapat pengaruh timbal balik dengan pemerintah terhadap motivasi membayar pajak.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Keadilan Umum Terhadap Motivasi Membayar Pajak

Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh keadilan umum terhadap motivasi membayar pajak adalah sebesar 0,718 > 0,05 dan nilai t hitung 0,363 < t tabel 1,98667, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh keadilan umum terhadap motivasi membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pris (2010) yang juga meneliti mengenai pengaruh dimensi keadilan

pajak. Hasilnya adalah bahwa dimensi keadilan pajak tidak berpengaruh secara signifikan.

Wajib Pajak Orang Pribadi secara umum menganggap sistem perpajakan dan distribusi pajak telah adil, namun rasa keadilan ini tidak memengaruhi motivasi membayar pajak. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Pris (2010) bahwa Wajib Pajak lebih berorientasi pada aturan yang berlaku dan sanksi yang mungkin diterima dalam membayar pajak dibandingkan keadilan yang mereka terima. Responden dalam penelitian ini paling banyak adalah dari karyawan/pegawai yang dalam pengenaan atau pemotongan pajaknya biasa dilakukan oleh pihak ketiga dan Wajib Pajak tinggal melaporkan sendiri (*self assessment system*). Semua ini sudah tersistematis berjalan sesuai aturan dan sanksi akan dikenakan apabila tidak melapor.

Berdasarkan pendapat dari beberapa responden, mereka terdorong untuk menjadi Wajib Pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan karena, untuk memenuhi syarat hutang di bank ada juga yang berpendapat untuk jual beli properti, untuk mencari pekerjaan dsb. Semua ini, pada intinya adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Adanya kebutuhan individu menjadi salah satu faktor yang memengaruhi motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu.

2. Pengaruh Kepentingan Pribadi Terhadap Motivasi Membayar Pajak

Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar $0,920 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,101 < t$ tabel $1,98667$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 2 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh kepentingan pribadi terhadap motivasi membayar pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Pris (2010). Pris menyatakan bahwa peraturan perpajakan yang mengikat lebih menjadi pertimbangan dalam membayar pajak dari pada adanya kepentingan pribadi. Kemungkinan sanksi yang akan didapatkan lebih menjadi perhatian dibandingkan hanya mempertimbangkan apakah kepentingan pribadi mereka terpenuhi dengan membayar pajak penghasilan. Proses timbulnya motivasi seseorang dijelaskan dalam Ardana, Mujiati dan Sriathi (2013) yang salah satunya adalah adanya imbalan dan hukuman.

3. Pengaruh Struktur Tarif Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak

Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar 0,158 > 0,05 dan nilai t hitung 1,423 < t tabel 1,98667, sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 3 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh struktur tarif pajak terhadap motivasi membayar pajak. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Pris (2010). Pris menjelaskan bahwa baik tarif yang dikenakan adalah tarif proporsional ataukah tarif tetap, hal ini tidak memengaruhi sebab, Wajib Pajak akan tetap wajib membayarnya.

Responden yang ada rata-rata tidak mengerti mengenai jenis-jenis tarif pajak yang dikenakan kepada mereka sehingga wajar jika mereka tidak mampu menilai adil ataukah tidak peneanaan tarif pajak yang dikenakan pemerintah. Ditambah lagi banyak diantara mereka ibu-ibu yang awam dengan masalah pajak yang menjadi kewajibannya untuk dipenuhi. Dari 96 responden sebesar 60,42% adalah perempuan. Kurangnya sosialisasi atau edukasi perpajakan keseluruhan lini masyarakat di Kabupaten Pacitan menjadi salah satu penyebab rendahnya motivasi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Pengaruh Ketentuan-Ketentuan yang Diberlakukan Khusus Terhadap Motivasi Membayar Pajak

Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X4 terhadap Y adalah sebesar $0,004 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,923 > t$ tabel $1,98667$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 4 diterima yang berarti terdapat pengaruh ketentuan-ketentuan yang diberlakukan khusus terhadap motivasi membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan (2012). Ketentuan-ketentuan yang diberlakukan khusus dengan semakin banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang memihak kepada rakyat maka Wajib Pajak pun akan menyambut baik kebijakan pajak tersebut. Selama ini kebijakan khusus ini hanyalah menguntungkan kelompok tertentu saja seperti pengampunan pajak yang kebanyakan dana pajak didapat dari Wajib Pajak dalam negeri dan bukan dari menarik dana yang ada di Luar Negeri seperti yang menjadi tujuan pemerintah selama ini. Motivasi lainnya rata-rata Wajib Pajak di KP2KP Pacitan berpendapat bahwa mereka menjadi Wajib Pajak dan mau untuk membayar pajak karena awalnya ingin berhutang di bank dan mereka butuh NPWP sebagai syaratnya, ada juga yang berpendapat bahwa menjadi Wajib Pajak merupakan syarat untuk mereka dapat bekerja, dsb.

5. Pengaruh Timbal Balik dengan Pemerintah Terhadap Motivasi Membayar Pajak

Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X5 terhadap Y adalah sebesar $0,020 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,376 > t$ tabel $1,98667$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H5 diterima yang berarti terdapat pengaruh timbal balik dengan pemerintah

terhadap motivasi membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Dharmawan (2012). Timbal balik dengan pemerintah yang memengaruhi motivasi ini memang berwujud nyata atau dapat dirasakan langsung keberadaannya sehingga mampu menjadi pendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Misalnya, pembangunan maupun perbaikan fasilitas publik akan menjadikan masyarakat dapat merasakan hasil dari apa yang mereka bayarkan apalagi ditambah dengan perbaikan pelayanan maupun birokrasi yang ada, bisa untuk menambah motivasi seseorang dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan Teori Harapan Vroom bahwa harapan merepresentasikan kepercayaan seseorang bahwa sebuah tingkatan usaha akan diikuti dengan tingkatan kinerja tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa ketika seseorang menginginkan pelayanan publik yang baik, perbaikan dan penambahan fasilitas publik dsb yang sumber dana utamanya didapat dari pajak yang mereka bayarkan maka hal ini mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain dari fasilitas umum yang terus diperbaiki oleh pemerintah dapat mendorong seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, masyarakat juga akan lebih termotivasi jika pelayanan pemerintah semakin baik, cepat, efektif dan efisien. KP2KP Pacitan lewat visi misinya melakukan hal yang sama. Terbukti dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien mampu menjadikan KP2KP ini bisa memiliki jumlah Wajib Pajak yang cukup banyak hingga mencapai 35.813 orang.

6. Pengaruh Keadilan Umum, Kepentingan Pribadi, Struktur Tarif Pajak, Ketentuan-Ketentuan yang Diberlakukan Khusus dan Timbal Balik dengan Pemerintah Terhadap Motivasi Membayar Pajak

Berdasarkan hasil uji simultan (F) diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1, X2, X3, X4 dan X5 secara simultan terhadap Y adalah $0,002 < 0,05$ dan nilai F hitung $4,270 > F$ tabel 2,31, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh X1, X2, X3, X4 dan X5 secara simultan terhadap Y. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhartini (2015) dengan judul Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Motivasi sebagai Variabel Intervening. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa keadilan sistem pajak berpengaruh terhadap motivasi.

Berdasarkan hasil uji parsil (t) menunjukkan bahwa variabel keadilan umum, kepentingan pribadi dan struktur tarif pajak tidak berpengaruh terhadap motivasi Wajib Pajak untuk membayar pajak, sedangkan yang memengaruhi motivasi seseorang dalam membayar pajak adalah ketentuan-ketentuan yang diberlakukan khusus dan timbal balik dengan pemerintah. Dua variabel yang memengaruhi motivasi ini memang berwujud nyata yang mampu mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap motivasi membayar pajak (studi pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pacitan) didapatkan hasil bahwa:

1. Keadilan umum tidak berpengaruh terhadap motivasi seseorang dalam membayar pajak.
2. Kepentingan pribadi tidak berpengaruh terhadap motivasi seseorang dalam membayar pajak.
3. Struktur tarif pajak tidak berpengaruh terhadap motivasi seseorang dalam membayar pajak.
4. Ketentuan-ketentuan yang diberlakukan khusus berpengaruh terhadap motivasi seseorang dalam membayar pajak.
5. Timbal balik dengan pemerintah berpengaruh terhadap motivasi seseorang dalam membayar pajak.
6. Keadilan umum, kepentingan pribadi, struktur tarif pajak, ketentuan-ketentuan yang diberlakukan khusus dan timbal balik dengan pemerintah secara bersamaan (simultan) berpengaruh terhadap motivasi membayar pajak dengan nilai 19,2%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah

1. Terkait dengan pendistribusian pembebanan pajak ini, sangat diperlukan *update* data terkait Wajib Pajak secara lengkap. Misalnya data berkenaan dengan jumlah Wajib Pajak yang aktif dalam membayar pajak dibandingkan dengan jumlah keseluruhan Wajib Pajak yang ada. Apabila sudah diketahui jumlahnya dan data terkait Wajib Pajak yang tidak aktif ini bisa untuk dianalisis dan kemudian diambil tindakan yang tepat untuk mengoptimalkannya. Semua ini bisa juga untuk menjadi bahan evaluasi, efektif atukah belum program-program yang telah KP2KP lakukan selama ini.
2. KP2KP harus lebih gencar melakukan penyuluhan atau sosialisasi terhadap Wajib Pajak. Terlebih lagi bagi Wajib Pajak baru yang mereka juga minim pengetahuan perpajakan. Wawasan perpajakan bisa mulai ditanamkan sejak dini yaitu mulai usia-usia sekolah misal diadakan sosialisasi ke SD, SMP, SMA atau Perguruan Tinggi maupun instansi-instansi dengan rutin untuk semakin mendekatkan pajak dengan masyarakat.
3. Dibutuhkan peningkatan dari manfaat pajak yang telah Wajib Pajak bayarkan. Perbaikan dalam pelayanan publik dan pembagunan fasilitas umum ini harus terus diupayakan oleh pemerintah. Apabila fasilitas umum dan pelayanan publik ini terus bertambah baik maka dapat mendorong Wajib Pajak untuk tetap membayar pajak.

4. Saran untuk penelitian selanjutnya agar mengkaji lebih lanjut terkait definisi dari pajak apakah sudah mengakomodir prinsip keadilan. Karena, dilihat dari definisi perpajakan dalam undang-undang yang merupakan iuran wajib masyarakat, tanpa kontraprestasi langsung, diatur undang-undang dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardana, Komang, Mujiati Ni Wayan dan Sriathi Anak Agung Ayu. 2013. *Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Churphy, Hughes dan Ginnett. 2012. *Leadership*. Jakarta: Salemba Humanika
- Creswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran Edisi Empat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Indriantoro, Nur dan Supomo Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE
- Noor, Juliansyah. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana
- Kreitner, Robert dan Kinicki Angelo. 2014. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Luthans, Fred. 2005. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardismo. 2008. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mohyi, Ach. 2012. *Teori dan Perilaku Organisasi*. Malang: UMM Press
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Robbins, Stephen P, Timothy A Judge. 2014. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Setyowati. 2013. *Organisasi dan Kepemimpinan Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Alfabeta
- Supramono. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Suprihanto, John. 2014. *Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Tampubolon, Manahan P. 2012. *Perilaku Keorganisasian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Thoha Miftah. 2015. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Jurnal

- Azmi, Anna A.Che, Perumal Kamala A.. 2008. *Tax Fairness Dimentions In An Asian Context: The Malaysian Perspective*. Jurnal International
- Caroko, Bayu, Heru Susilo, Zahroh Z.A. 2015. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak*. Universitas Brawiaya. Malang: Dipublikasikan
- Dharmawan, Ferdyanto. 2012. *Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi pada KPP Pratama Malang Selatan)*. Universitas Brawijaya. Malang: Dipublikasikan
- Dianawati, Susi. 2008. *Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta: Dipublikasikan
- Istanto, Fery. 2010. *Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta: Dipublikasikan
- Pris, Andarini. 2010. *Dampak Dimensi Keadilan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Universitas Diponegoro. Semarang: Dipublikasikan
- Putri, Roralita Lukmana. 2016. *Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta: Dipublikasikan
- Suhartini, Dini. 2015. *Pengaruh Keadilan Sistem perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Motivasi sebagai Variabel Intervening*. Universitas Riau. Pekanbaru: Dipublikasikan

Internet

- Admin. 2016. *Pengertian Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak*. Diakses pada 26 Februari 2018, dari <https://www.suduthukum.com>
- Ariyanti, Fiki. 2017. *Sri Mulyani: kepatuhan Bayar Pajak Rendah, Pengaruhi APBN*. Diakses pada 26 Februari 2018, dari <http://bisnis.liputan6.com>

- Evadiar, Lizha. 2009. *Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dikota Batu dalam Memiliki NPWP*. Diakses pada 12 Maret 2018 dari <http://eprints.umm.ac.id>
- Ivancevich John M, Konopaske Robert, Matteson Michael T. 2006. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Diakses pada 14 Maret 2018 dari <https://books.google.co.id>
- Kusuma, Hendra. 2017. Dirjen Pajak Bakal Buka-Bukaan Soal Pajak Profes Penulis. Diakses pada 13 Desember 2018 dari <http://finance.detik.com>
- Novalius, Feby. 2018. Tingkat Kemiskinan Masih Tinggi Sri Mulyani Punya Strategi Mengatasinya. Diakses pada 14 April 2018 dari <http://economy.okezone.com>
- Perwitasari, Puspa. 2017. *Jokowi Heran Banyak Pejabat Ditangkap, tetapi Korupsi Tetap Ada*. Diakses pada 12 April 2018 dari <http://nasional.kompas.com>
- Prasetyowati, Didin. 2016. *Analisis Statistik Teori dan Aplikasi Menggunakan SPSS*. Diakses pada 13 Maret 2018 dari <https://student.uigm.ac.id>
- Putri, Sany Eka dan Rekohadi Dyan. 2017. *Hanya 3 Ribu Wajib Pajak di Kota Batu yang Rajin Bayar Pajak, Seperti Ini Pencapaian Target Pajaknya*. Diakses pada 10 Maret 2018, dari <http://suryamalang.tribunnews.com>
- Raharjo, Sahid. 2014. *Cara Melakukan Uji Validitas Product Momen dengan SPSS*. Diakses pada 20 Maret 2018 dari www.spssindonesia.com
- Ramadani, Aziz. 2017. *Tempati Kantor Baru, KPP Pratama Batu Ingin Ulangi Sejarah 2015*. Diakses pada tanggal 8 Maret 2018, dari <https://malangvoice.com>
- Ratri, Nurlayla dan Heryanto. 2017. *Capaian Lampau Target, Tapi Tiga Kantor Pajak Malang Raya Tak Catat Pertumbuhan*. Diakses pada tanggal 3 Maret 2018, dari <http://www.malangtimes.com>
- Saputri, Maya. 2017. *Putuskan Kontrak Penerbit Gara-Gara Pajak Penulis*. Diakses pada tanggal 13 Desember 2018, dari <http://Tirto.id>
- Sufren dan Natanael Yonathan. 2014. *Belajar Otodidak SPSS Pasti Bisa*. Diakses pada 20 Maret 2018 pada <https://books.google.co.id>
- Wisanggeni, Irwan. 2016. *Meluruskan Keadilan Pajak*. Diskses 13 Desember 2018 pada <http://id.beritasatu>
- Yusri. 2016. *Ilmu Pragmatik dalam Prespektif Kesopanan Berbahasa*. Diakses 20 Maret 2018 pada <https://books.google.co.id>

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuesioner

KUESIONER

Judul Penelitian:

“PENGARUH KEADILAN PAJAK TERHADAP MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK”

Data Responden

- 1. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan **(coret yang tidak perlu)*
- 2. Usia : Tahun
- 3. Tingkat Pendidikan :
- 4. Jenis Profesi :

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (√) centang pada kolom yang tersedia untuk masing-masing jawaban pernyataan kuesioner.

*Skala yang digunakan sebagai berikut:

- STS : Sangat Tidak Setuju
- TS : Tidak Setuju
- N : Netral
- S : Setuju
- SS : Sangat Setuju

1. Tabel Pernyataan Variabel Keadilan Umum (X1)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Sistem perpajakan di Indonesia sudah diatur secara adil untuk setiap Wajib Pajak.					
2	Secara umum cara pembebanan pajak didistribusikan secara adil kepada setiap Wajib Pajak.					
3	Menurut saya pajak yang dibebankan pada saya sudah secara adil.					

2. Tabel pernyataan Variabel Kepentingan Pribadi (X2)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Hukum pajak mengharuskan untuk membayar lebih besar dibandingkan pembagian pajak yang telah sesuai					
2	Dibandingkan dengan Wajib Pajak lain, pajak yang saya bayarkan lebih kecil.					
3	Dibandingkan dengan jumlah yang dibayarkan oleh Wajib Pajak yang lain pajak yang saya bayarkan lebih besar.					

3. Tabel Pernyataan Variabel Struktur Tarif Pajak (X3)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Penerima penghasilan tinggi membayar pajak lebih besar.					
2	Menurut saya tarif pajak proposional adil;					
3	Tarif pajak yang adil adalah harus sama untuk setiap Wajib Pajak;					
4	Pengenaan tarif pajak <i>flat</i> adalah adil.					

4. Tabel Pernyataan Variabel Ketentuan-Ketentuan yang Diberlakukan Khusus (X4)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Ketentuan- ketentuan khusus untuk Wajib Pajak tertentu tidak adil;					
2	Pengurangan pajak hanya dapat digunakan oleh Wajib Pajak tertentu itu tidak adil;					
3	Kebijakan pengampunan pajak yang dilakukan pemerintah untuk yang belum melaporkan hartanya itu tidak adil					
4	Wajib Pajak yang memiliki penghasilan sama harus dikenakan pajak yang sama adalah tidak adil					

5. Tabel Pernyataan Variabel Keadilan Umum (X5)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Menurut Saya, nilai manfaat yang diterima sesuai dan adil dengan pajak yang dibayarkan;					
2	Pajak penghasilan yang dibayarkan terlalu tinggi jika dibandingkan manfaat yang diterima;					
3	Manfaat yang diterima atas pembayaran pajak penghasilan telah sesuai/adil;					

6. Tabel Pernyataan Variabel Motivasi Memayar Pajak (Y)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya melaksanakan kewajiban perpajakan timbul dengan sukarela dan dari kesadaran sendiri					
2	Membayar pajak merupakan salah satu bentuk pengabdian saya kepada negara					
3	Rakyat akan taat pajak jika keuangan negara dikelola dengan tertib, efisien, transparan					
4	Pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak, pembebanannya telah didistribusikan dengan merata dan sistem perpajakannya adil.					
5	Bagi saya membayar pajak penghasilan untuk masyarakat yang sudah berpenghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan suatu kewajiban.					
6	Manfaat pembayaran pajak salah satunya adalah penyediaan sarana pendidikan dan layanan kesehatan gratis yang disediakan pemerintah.					
7	Proporsi tarif pajak dan lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) harus menganut asas keadilan bagi masyarakat.					

8	Pembayaran Pajak Penghasilan sebaiknya dilakukan sebelum jatuh tempo karena jika sudah lewat akan terkena denda 2%.					
9	Pemberian informasi tentang pentingnya pajak tidak diperlukan karena banyak diantara masyarakat yang sudah memahaminya.					

~TERIMA KASIH~



2. Surat ijin penelitian



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONOROGO
KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN PACITAN
JALAN CUT MUTIA NO.4, PACITAN
TELEPON/ FAKSIMILE (0357) 881209
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S - 22 /WPJ.24/PPK.05/2018
Hal : Surat Ijin Kegiatan Riset / Survey

7 Juni 2018

Yth. **Ketua Jurusan Administrasi Bisnis**
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Di Tempat

Menindaklanjuti surat dari Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Nomor 6515/UN10.F03.12/PN/2018 tanggal 22 Mei 2018, mengenai Permohonan Ijin Kegiatan Riset / Survey atas nama:

Nama / NIM : Nirma Trianti / 14503041111043

Dengan ini disampaikan bahwa kami bersedia memberi kesempatan kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan kegiatan Riset / Survey, dengan mengikuti tata tertib dan kode etik di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Pacitan.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor

Agus Nugroho/
NIP.196608091986031001

Kp. : ppk.05

3.Uji Validitas

Correlations

		X.1.1	X.1.2	X.1.3	TOTALX1
X.1.1	Pearson Correlation	1	.707**	.164	.871**
	Sig. (2-tailed)		.000	.387	.000
	N	30	30	30	30
X.1.2	Pearson Correlation	.707**	1	.112	.824**
	Sig. (2-tailed)	.000		.556	.000
	N	30	30	30	30
X.1.3	Pearson Correlation	.164	.112	1	.529**
	Sig. (2-tailed)	.387	.556		.003
	N	30	30	30	30
TOTALX1	Pearson Correlation	.871**	.824**	.529**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.003	
	N	30	30	30	30

Correlations

		X.2.1	X.2.2	X.2.3	TOTALX2
X.2.1	Pearson Correlation	1	.168	.204	.664**
	Sig. (2-tailed)		.376	.279	.000
	N	30	30	30	30
X.2.2	Pearson Correlation	.168	1	.370*	.752**
	Sig. (2-tailed)	.376		.044	.000
	N	30	30	30	30
X.2.3	Pearson Correlation	.204	.370*	1	.695**
	Sig. (2-tailed)	.279	.044		.000
	N	30	30	30	30
TOTALX2	Pearson Correlation	.664**	.752**	.695**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



Correlations

		x.3.1	x.3.2	x.3.3	x.3.4	totalx3
x.3.1	Pearson Correlation	1	.121	.176	.027	.568**
	Sig. (2-tailed)		.524	.351	.886	.001
	N	30	30	30	30	30
x.3.2	Pearson Correlation	.121	1	-.131	.018	.351
	Sig. (2-tailed)	.524		.489	.924	.057
	N	30	30	30	30	30
x.3.3	Pearson Correlation	.176	-.131	1	.017	.675**
	Sig. (2-tailed)	.351	.489		.930	.000
	N	30	30	30	30	30
x.3.4	Pearson Correlation	.027	.018	.017	1	.467**
	Sig. (2-tailed)	.886	.924	.930		.009
	N	30	30	30	30	30
totalx3	Pearson Correlation	.568**	.351	.675**	.467**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.057	.000	.009	
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Correlations

		X.4.1	X.4.2	X.4.3	X.4.4	TOTALX4
X.4.1	Pearson Correlation	1	.388*	.468**	.034	.660**
	Sig. (2-tailed)		.034	.009	.858	.000
	N	30	30	30	30	30
X.4.2	Pearson Correlation	.388*	1	.390*	.109	.700**
	Sig. (2-tailed)	.034		.033	.566	.000
	N	30	30	30	30	30
X.4.3	Pearson Correlation	.468**	.390*	1	.233	.803**
	Sig. (2-tailed)	.009	.033		.216	.000
	N	30	30	30	30	30
X.4.4	Pearson Correlation	.034	.109	.233	1	.523**
	Sig. (2-tailed)	.858	.566	.216		.003
	N	30	30	30	30	30
TOTALX4	Pearson Correlation	.660**	.700**	.803**	.523**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.003	
	N	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Correlations

		X.5.1	X.5.2	X.5.3	TOTALX5
X.5.1	Pearson Correlation	1	-.371*	.530**	.492**
	Sig. (2-tailed)		.044	.003	.006
	N	30	30	30	30
X.5.2	Pearson Correlation	-.371*	1	-.472**	.449*
	Sig. (2-tailed)	.044		.008	.013
	N	30	30	30	30
X.5.3	Pearson Correlation	.530**	-.472**	1	.491**
	Sig. (2-tailed)	.003	.008		.006
	N	30	30	30	30
TOTALX5	Pearson Correlation	.492**	.449*	.491**	1
	Sig. (2-tailed)	.006	.013	.006	
	N	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	TOTAL Y
Y.1	Pearson Correlation	1	.611**	.172	.208	.704**	.421*	.308	.455*	-.032	.660**
	Sig. (2-tailed)		.000	.365	.271	.000	.020	.097	.012	.868	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.2	Pearson Correlation	.611**	1	.533**	.367*	.447*	.634**	.665**	.325	-.003	.792**
	Sig. (2-tailed)	.000		.002	.046	.013	.000	.000	.080	.986	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.3	Pearson Correlation	.172	.533**	1	.249	.266	.221	.622**	.393*	.465**	.666**
	Sig. (2-tailed)	.365	.002		.184	.156	.241	.000	.032	.010	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.4	Pearson Correlation	.208	.367*	.249	1	.316	.465**	.341	.374*	-.035	.431*
	Sig. (2-tailed)	.271	.046	.184		.089	.010	.065	.042	.854	.017
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.5	Pearson Correlation	.704**	.447*	.266	.316	1	.444*	.218	.552**	.183	.704**
	Sig. (2-tailed)	.000	.013	.156	.089		.014	.247	.002	.333	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.6	Pearson Correlation	.421*	.634**	.221	.465**	.444*	1	.555**	.361	-.058	.714**
	Sig. (2-tailed)	.020	.000	.241	.010	.014		.001	.050	.760	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.7	Pearson Correlation	.308	.665**	.622**	.341	.218	.555**	1	.266	.176	.698**
	Sig. (2-tailed)	.097	.000	.000	.065	.247	.001		.155	.353	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.8	Pearson Correlation	.455*	.325	.393*	.374*	.552**	.361	.266	1	.176	.608**

	Sig. (2-tailed)	.012	.080	.032	.042	.002	.050	.155		.352	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.9	Pearson Correlation	-.032	-.003	.465**	-.035	.183	-.058	.176	.176	1	.301
	Sig. (2-tailed)	.868	.986	.010	.854	.333	.760	.353	.352		.105
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL Y	Pearson Correlation	.660**	.792**	.666**	.431*	.704**	.714**	.698**	.608**	.301	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.017	.000	.000	.000	.000	.105	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



4.Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
Cronbach's Alpha	.802	.821
		4

Reliability X2

Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
Cronbach's Alpha	.774	.784
		4

Reliability X3

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.652	5

Reliability X4

Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
onbach's Alpha	.764	.791
		5

Reliability X5

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.647	4

Reliability Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.777	10

5. Uji multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	20.145	3.751		5.371	.000		
	X1	.067	.185	.040	.363	.718	.754	1.326
	X2	.024	.239	.011	.101	.920	.819	1.220
	X3	.253	.178	.141	1.423	.158	.910	1.099
	X4	.433	.148	.329	2.923	.004	.710	1.409
	X5	.543	.228	.252	2.376	.020	.798	1.253

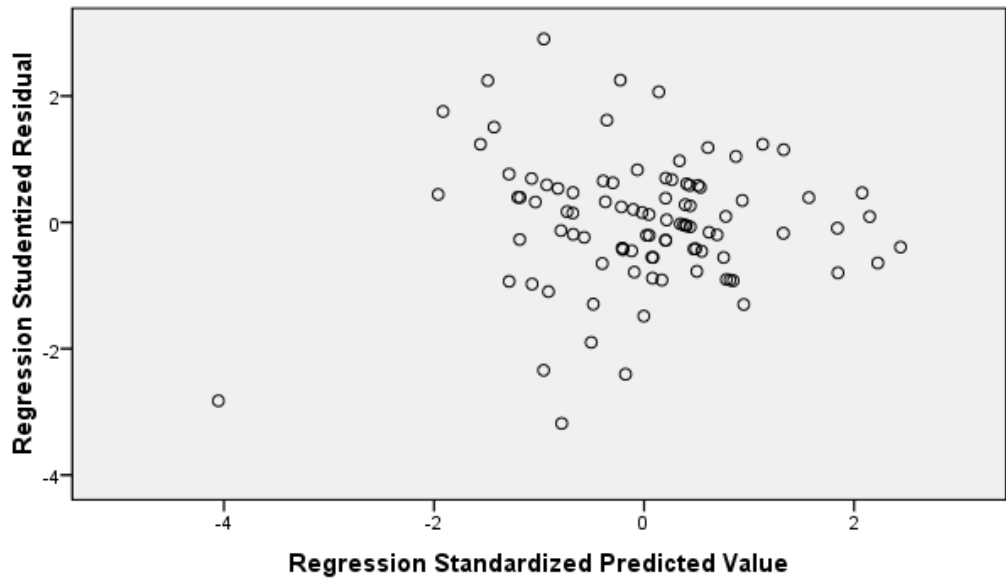
a. Dependent Variable: Y



6. Uji heteroskedastisitas

Scatterplot

Dependent Variable: motivasi



7. Uji normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			96
Normal Parameters ^a	Mean		.0000000
	Std. Deviation		3.02511216
Most Extreme Differences	Absolute		.084
	Positive		.084
	Negative		-.073
Kolmogorov-Smirnov Z			.824
Asymp. Sig. (2-tailed)			.506
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.482 ^c
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.469
		Upper Bound	.495
a. Test distribution is Normal.			

c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1502173562.

8. Uji hipotesis

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.438 ^a	.192	.147	3.108

a. Predictors: (Constant), x5, x3, x2, x1, x4

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	206.251	5	41.250	4.270	.002 ^a
	Residual	869.374	90	9.660		
	Total	1075.625	95			

a. Predictors: (Constant), x5, x3, x2, x1, x4

b. Dependent Variable: y

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20.145	3.751		5.371	.000
x1	.067	.185	.040	.363	.718
x2	.024	.239	.011	.101	.920
x3	.253	.178	.141	1.423	.158
x4	.433	.148	.329	2.923	.004
x5	.543	.228	.252	2.376	.020

a. Dependent Variable: y

9. Uji statistik deskriptif

Statistics

	y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y8	y9	totaly
N Valid	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean	4.00	4.15	4.39	3.40	3.73	4.23	4.19	3.52	3.97	35.56
Median	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	36.00
Mode	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Std. Deviation	.711	.665	.622	.900	.852	.624	.604	.725	.876	3.365
Variance	.505	.442	.387	.810	.726	.389	.364	.526	.767	11.322

	x5.1	x5.2	x5.3	totalx5
N Valid	96	96	96	96
Missing	0	0	0	0
Mean	3.45	2.97	3.44	9.85
Median	4.00	3.00	4.00	10.00
Mode	4	2	4	10
Std. Deviation	.939	.989	.792	1.563
Variance	.881	.978	.628	2.442

Statistics

	x4.1	x4.2	x4.3	x4.4	totalx4
N Valid	96	96	96	96	96
Missing	0	0	0	0	0
Mean	3.07	3.32	3.42	2.99	12.80
Median	3.00	3.50	3.00	3.00	13.00
Mode	3	4	3	2	12
Std. Deviation	.897	.989	1.012	.968	2.553
Variance	.805	.979	1.025	.937	6.518

Statistics

	x3.1	x3.2	x3.3	x3.4	totalx3
N Valid	96	96	96	96	96
Missing	0	0	0	0	0
Mean	4.09	3.61	3.43	3.10	14.24
Median	4.00	4.00	4.00	3.00	14.00
Mode	4	4	4	3	14
Std. Deviation	.741	.863	1.122	.864	1.879
Variance	.549	.745	1.258	.747	3.531

Statistics

	x2.1	x2.2	x2.3	TotalX2
N Valid	96	96	96	96
Missing	0	0	0	0
Mean	2.76	3.00	2.72	8.48
Median	3.00	3.00	3.00	9.00
Mode	3	3	3	9
Std. Deviation	.867	.781	.660	1.472
Variance	.753	.611	.436	2.168

Statistics

		x1.1	x1.2	x1.3	TotalX1
N	Valid	96	96	96	96
	Missing	0	0	0	0
Mean		3.61	3.44	3.60	10.66
Median		4.00	4.00	4.00	11.00
Mode		4	4	4	12
Std. Deviation		.944	.892	.688	1.989
Variance		.892	.796	.473	3.954

10. Tabel Frekuensi :

x1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	4	4.2	4.2	4.2
	2	13	13.5	13.5	17.7
	3	5	5.2	5.2	22.9
	4	68	70.8	70.8	93.8
	5	6	6.2	6.2	100.0
Total		96	100.0	100.0	

x1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	5	5.2	5.2	5.2
	2	9	9.4	9.4	14.6
	3	23	24.0	24.0	38.5
	4	57	59.4	59.4	97.9
	5	2	2.1	2.1	100.0
Total		96	100.0	100.0	

x1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	8	8.3	8.3	8.3
	3	25	26.0	26.0	34.4
	4	60	62.5	62.5	96.9
	5	3	3.1	3.1	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

x2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	6	6.2	6.2	6.2
	2	31	32.3	32.3	38.5
	3	40	41.7	41.7	80.2
	4	18	18.8	18.8	99.0
	5	1	1.0	1.0	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

x2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	3	3.1	3.1	3.1
	2	19	19.8	19.8	22.9
	3	50	52.1	52.1	75.0
	4	23	24.0	24.0	99.0
	5	1	1.0	1.0	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

x2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	2.1	2.1	2.1
	2	32	33.3	33.3	35.4
	3	53	55.2	55.2	90.6
	4	9	9.4	9.4	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

x3.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1.0	1.0	1.0
	2	2	2.1	2.1	3.1
	3	10	10.4	10.4	13.5
	4	57	59.4	59.4	72.9
	5	26	27.1	27.1	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

x3.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	2.1	2.1	2.1
	2	9	9.4	9.4	11.5
	3	22	22.9	22.9	34.4
	4	54	56.2	56.2	90.6
	5	9	9.4	9.4	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

x3.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	6	6.2	6.2	6.2
	2	19	19.8	19.8	26.0
	3	10	10.4	10.4	36.5
	4	50	52.1	52.1	88.5
	5	11	11.5	11.5	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

x3.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	5	5.2	5.2	5.2
	2	15	15.6	15.6	20.8
	3	42	43.8	43.8	64.6
	4	33	34.4	34.4	99.0
	5	1	1.0	1.0	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

x4.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	3	3.1	3.1	3.1
	2	20	20.8	20.8	24.0
	3	46	47.9	47.9	71.9
	4	21	21.9	21.9	93.8
	5	6	6.2	6.2	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

x4.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	3	3.1	3.1	3.1
	2	19	19.8	19.8	22.9
	3	26	27.1	27.1	50.0
	4	40	41.7	41.7	91.7
	5	8	8.3	8.3	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

x4.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	3	3.1	3.1	3.1
	2	14	14.6	14.6	17.7
	3	33	34.4	34.4	52.1
	4	32	33.3	33.3	85.4
	5	14	14.6	14.6	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

x4.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	2.1	2.1	2.1
	2	35	36.5	36.5	38.5
	3	25	26.0	26.0	64.6
	4	30	31.2	31.2	95.8
	5	4	4.2	4.2	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

x5.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	3	3.1	3.1	3.1
	2	17	17.7	17.7	20.8
	3	14	14.6	14.6	35.4
	4	58	60.4	60.4	95.8
	5	4	4.2	4.2	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

x5.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	2.1	2.1	2.1
	2	36	37.5	37.5	39.6
	3	27	28.1	28.1	67.7
	4	25	26.0	26.0	93.8
	5	6	6.2	6.2	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

x5.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	16	16.7	16.7	16.7
	3	24	25.0	25.0	41.7
	4	54	56.2	56.2	97.9
	5	2	2.1	2.1	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

y1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1.0	1.0	1.0
	2	4	4.2	4.2	5.2
	3	6	6.2	6.2	11.5
	4	68	70.8	70.8	82.3
	5	17	17.7	17.7	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

y2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1.0	1.0	1.0
	2	2	2.1	2.1	3.1
	3	3	3.1	3.1	6.2
	4	66	68.8	68.8	75.0
	5	24	25.0	25.0	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

y3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1.0	1.0	1.0
	3	4	4.2	4.2	5.2
	4	48	50.0	50.0	55.2
	5	43	44.8	44.8	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

y4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	4	4.2	4.2	4.2
	2	12	12.5	12.5	16.7
	3	25	26.0	26.0	42.7
	4	52	54.2	54.2	96.9
	5	3	3.1	3.1	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

y5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	3	3.1	3.1	3.1
	2	4	4.2	4.2	7.3
	3	21	21.9	21.9	29.2
	4	56	58.3	58.3	87.5
	5	12	12.5	12.5	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

y6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1.0	1.0	1.0
	3	4	4.2	4.2	5.2
	4	62	64.6	64.6	69.8
	5	29	30.2	30.2	100.0
	Total	96	100.0	100.0	



y7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	10	10.4	10.4	10.4
	4	58	60.4	60.4	70.8
	5	28	29.2	29.2	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

y8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1.0	1.0	1.0
	2	6	6.2	6.2	7.3
	3	35	36.5	36.5	43.8
	4	50	52.1	52.1	95.8
	5	4	4.2	4.2	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

y9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	8	8.3	8.3	8.3
	3	14	14.6	14.6	22.9
	4	47	49.0	49.0	71.9
	5	27	28.1	28.1	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

11. Data Hasil Questioner

No Res.	X1 (Keadilan Umum)			X2 (Kepentingan Pribadi)			X3 (Struktur Tarif Pajak)				X4 (Ketentuan yang Diberlakukan Khusus)				X5 (Timbal Balik Pemerintah)		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1	4	4	3	3	3	3	3	4	2	4	3	3	3	3	4	3	4
2	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	2	5	3	4
3	4	4	4	2	3	3	4	4	2	4	3	4	4	2	5	2	4
4	2	3	4	2	2	3	4	3	4	2	3	2	3	2	4	4	5
5	4	4	4	5	4	3	4	4	2	3	3	3	3	2	4	4	3
6	4	3	4	2	4	3	4	3	4	4	3	3	3	2	5	4	4
7	4	4	4	2	2	2	4	4	1	3	2	4	1	2	4	2	4
8	2	3	2	2	5	2	5	5	1	2	5	5	5	2	2	5	2
9	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4
10	4	4	4	4	2	2	2	4	2	4	2	4	4	4	4	2	4
11	4	4	3	3	4	4	3	4	2	2	3	4	3	3	4	3	4
12	4	4	3	2	3	3	4	3	2	4	2	4	4	3	3	4	3
13	4	4	3	3	3	3	4	4	2	4	3	3	4	2	4	3	4
14	2	2	4	3	3	3	5	3	5	4	4	5	3	4	3	2	3
15	4	4	4	3	4	3	5	4	4	3	3	2	3	4	4	2	4
16	4	3	3	3	4	2	5	3	4	2	3	4	3	3	3	3	4
17	5	5	3	3	3	3	5	3	1	5	4	4	5	2	2	5	2
18	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
19	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	2	4	2	4
20	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	5	4	4	3	3
21	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3
22	3	3	4	3	3	2	3	3	4	3	3	3	5	4	4	3	4
23	4	4	4	1	1	1	3	4	2	3	1	1	1	1	3	1	3
24	4	4	4	3	2	2	4	4	2	3	3	4	4	2	4	2	4



No Res.	X1 (Keadilan Umum)			X2 (Kepentingan Pribadi)			X3 (Struktur Tarif Pajak)				X4 (Ketentuan yang Diberlakukan Khusus)				X5 (Timbal Balik Pemerintah)		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
25	4	4	4	3	4	2	4	5	2	4	2	4	2	2	4	2	4
26	5	4	4	4	3	2	4	4	4	3	3	2	2	4	4	4	5
27	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	2	4	4	4	4	2	4
28	3	4	3	3	3	2	3	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3
29	4	4	4	2	3	3	4	5	4	4	3	3	2	4	4	2	4
30	4	4	4	3	4	4	4	4	3	2	3	4	4	4	4	4	4
31	4	4	5	2	3	2	5	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4
32	2	2	4	2	2	3	5	4	1	1	2	2	5	2	2	4	2
33	4	4	4	2	3	3	5	4	2	4	2	2	5	1	4	1	4
34	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3
35	4	4	3	3	3	2	4	4	4	3	1	1	2	2	4	4	4
36	4	4	4	4	1	1	5	3	4	3	3	3	4	2	4	3	4
37	4	5	4	3	3	3	4	5	2	4	4	4	4	4	2	4	2
38	4	4	4	3	3	2	4	3	4	2	3	2	2	2	3	2	3
39	4	4	4	2	3	3	4	3	4	3	3	2	4	2	2	4	2
40	4	4	4	2	4	3	4	4	4	4	2	4	2	2	4	2	4
41	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	2	3	2	3
42	3	2	4	4	4	2	4	2	2	4	5	2	4	4	2	5	3
43	4	4	4	3	3	3	4	3	2	3	3	3	4	3	3	3	4
44	4	4	4	2	2	2	5	4	4	3	3	3	4	2	4	2	4
45	4	4	4	1	1	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3
46	4	2	4	2	4	2	4	4	4	3	2	4	2	2	4	2	4
47	4	4	3	2	3	2	4	3	4	2	2	2	3	2	4	2	4
48	4	4	3	2	3	2	4	4	4	2	2	4	2	2	4	2	4
49	5	4	3	3	3	3	3	4	2	3	2	3	3	3	4	2	4



No Res.	X1 (Keadilan Umum)			X2 (Kepentingan Pribadi)			X3 (Struktur Tarif Pajak)				X4 (Ketentuan yang Diberlakukan Khusus)				X5 (Timbal Balik Pemerintah)		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
50	4	4	4	3	2	3	4	4	3	3	2	3	2	3	4	3	4
51	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4
52	4	4	3	2	3	2	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3
53	5	4	4	4	4	2	5	4	2	4	3	4	2	3	4	2	4
54	4	4	3	2	4	2	4	2	4	4	4	4	4	4	5	2	4
55	4	3	4	2	2	3	4	4	4	3	3	4	2	2	3	3	4
56	4	4	3	2	3	3	4	4	4	3	2	2	3	2	4	2	4
57	4	3	4	3	3	2	4	4	4	3	4	4	3	2	4	2	3
58	2	3	4	2	3	3	4	4	4	3	4	4	3	2	4	2	3
60	3	3	4	2	3	3	4	3	4	4	4	4	3	2	4	2	4
61	4	2	2	3	3	4	4	2	3	3	4	3	2	4	2	4	4
62	4	3	4	2	3	3	4	4	4	2	3	4	3	2	4	2	4
63	4	4	4	3	4	2	5	4	4	4	3	4	4	3	4	2	4
64	4	4	4	4	4	2	5	4	4	4	3	4	3	2	4	2	4
65	4	4	5	3	3	2	4	4	2	4	3	3	5	4	4	3	3
66	5	3	3	1	2	2	3	4	4	3	2	2	3	3	4	4	3
67	2	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	2	2
68	2	2	3	4	3	3	5	5	1	3	5	5	5	5	1	3	2
69	4	4	3	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	3	4	5	4
70	4	4	3	3	4	3	4	2	4	2	2	4	4	4	4	2	2
71	1	1	4	3	3	2	4	3	4	3	3	2	3	4	2	3	3
72	4	3	4	4	4	4	4	4	2	3	2	2	4	4	4	4	3
73	2	3	3	1	3	3	5	3	5	1	3	5	5	3	2	2	3
74	4	4	4	2	2	2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
75	2	3	3	1	3	3	5	3	5	1	3	5	5	3	2	4	3



No Res.	X1 (Keadilan Umum)			X2 (Kepentingan Pribadi)			X3 (Struktur Tarif Pajak)				X4 (Ketentuan yang Diberlakukan Khusus)				X5 (Timbal Balik Pemerintah)		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
76	4	3	2	3	2	3	4	4	4	3	2	4	2	4	2	3	4
77	2	3	3	1	3	3	5	3	5	1	3	5	5	3	2	4	3
78	4	3	4	2	2	2	4	2	4	3	4	2	4	4	4	3	4
79	4	4	4	2	4	4	4	2	4	2	4	4	4	4	4	4	2
80	4	4	4	3	3	3	2	4	2	4	3	3	3	3	4	5	4
81	2	3	2	2	3	3	4	2	4	2	2	4	3	2	4	2	4
82	4	4	4	3	2	2	4	1	5	2	4	4	4	2	4	2	2
83	1	1	4	3	3	3	1	2	3	3	3	2	3	4	4	2	4
84	2	2	2	2	4	2	5	5	5	1	5	1	5	2	1	4	2
85	4	1	4	3	2	3	4	1	4	2	1	5	1	5	1	5	2
86	4	3	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	3	2	3	2	4
87	4	4	4	4	2	4	5	5	4	4	3	3	4	4	2	4	2
88	5	4	4	2	4	3	5	5	5	4	4	2	4	4	4	4	4
89	2	2	2	4	2	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4
90	1	2	4	3	3	3	5	4	5	3	4	4	4	4	2	3	2
91	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
92	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	2	3	3
93	4	4	4	2	4	3	5	4	4	4	2	4	2	2	4	2	4
94	4	4	4	2	3	3	4	4	4	4	3	2	5	4	4	3	4
95	4	4	5	4	3	2	5	4	5	2	4	3	4	5	4	4	4
96	1	1	2	3	3	3	5	4	4	3	4	4	4	4	2	3	2



No Res.	Y (Motivasi Membayar Pajak)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4	4	4	3	4	3	3	3	3
2	3	2	2	4	3	5	3	3	3
3	4	4	5	3	3	4	4	4	4
4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
5	5	5	4	3	3	4	4	3	3
6	4	4	4	4	3	4	4	3	4
7	4	4	5	4	4	4	4	4	5
8	2	5	5	5	2	5	5	2	4
9	4	5	5	3	3	4	4	4	2
10	4	4	4	4	4	4	4	4	2
11	4	4	5	4	3	4	5	4	3
12	2	4	5	3	3	4	4	4	4
13	4	4	4	3	4	4	4	3	3
14	5	4	5	2	4	4	4	4	4
15	4	4	5	3	4	4	4	3	4
16	4	4	4	4	4	4	4	3	4
17	4	4	5	4	5	4	4	4	4
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3
19	4	4	5	4	4	4	4	4	4
20	4	4	5	3	4	5	4	4	5
21	4	4	5	3	5	4	4	4	5
22	4	4	4	3	4	4	4	4	3
23	1	1	4	4	1	1	3	2	5
24	4	5	5	4	4	5	4	3	4
25	4	4	4	4	4	4	4	4	2
26	5	5	5	4	5	5	5	4	2

No Res.	Y (Motivasi Membayar Pajak)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	4	4	5	4	4	4	4	4	4
28	4	5	5	4	4	5	4	5	4
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	5	5	4	4	4	4	4	3	4
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	5	4	5	1	5	5	5	3	5
33	5	5	5	4	5	5	5	4	5
34	4	5	5	5	3	4	4	4	4
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	5	5	5	3	4	5	3	4	5
37	5	5	5	4	1	4	5	1	4
38	4	4	4	3	3	4	4	3	5
39	4	4	4	3	4	4	4	4	4
40	4	4	4	3	4	4	4	2	4
41	4	4	4	3	4	4	3	3	4
42	4	4	5	2	4	5	5	4	5
43	4	4	3	2	4	4	4	4	5
44	5	5	5	3	5	5	5	4	5
45	2	2	3	3	3	3	3	3	3
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4
49	3	4	4	4	3	4	4	3	5
50	5	5	4	4	3	4	4	3	5
51	5	5	4	4	3	4	4	3	4
52	4	4	3	3	2	4	4	3	4
53	4	4	4	4	4	4	4	3	2



No Res.	Y (Motivasi Membayar Pajak)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	5	5	5	4	3	5	5	5	4
55	5	5	5	3	4	5	5	4	4
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4
57	4	4	4	4	4	4	4	3	3
58	4	4	4	4	4	4	4	3	3
60	4	4	4	4	4	4	4	3	4
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4
63	4	4	4	4	4	4	4	3	2
64	4	4	4	4	4	4	4	3	5
65	4	4	4	4	5	3	3	4	4
66	4	4	4	2	3	4	3	4	3
67	4	5	5	2	3	5	4	3	4
68	4	4	5	2	4	5	5	4	5
69	3	5	5	4	5	5	5	4	2
70	4	4	5	4	2	5	4	2	4
71	4	4	5	5	3	5	4	3	2
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4
73	4	4	5	2	4	4	5	4	5
74	4	4	4	4	4	4	5	4	4
75	4	3	5	2	4	4	5	4	5
76	2	4	4	3	3	4	3	3	3
77	4	4	5	2	4	4	5	4	5
78	4	5	5	3	4	5	4	4	4
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4
80	4	5	4	4	5	5	5	3	5
81	4	4	4	4	4	4	4	3	4

No Res.	Y (Motivasi Membayar Pajak)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	4	4	5	1	4	5	4	4	4
83	3	3	4	3	1	5	5	2	5
84	3	4	5	2	2	5	5	2	3
85	4	4	5	1	5	5	5	5	3
86	4	4	4	4	3	4	4	3	4
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4
88	5	5	5	4	4	4	5	4	4
89	4	4	4	3	4	5	4	3	5
90	4	4	4	4	4	4	5	3	5
91	4	5	5	2	4	5	5	3	5
92	4	4	4	4	4	4	4	3	4
93	5	5	5	3	5	5	5	4	5
94	5	5	5	4	4	4	5	4	5
95	4	4	4	4	4	4	5	5	5
96	4	4	5	1	5	5	5	3	4

